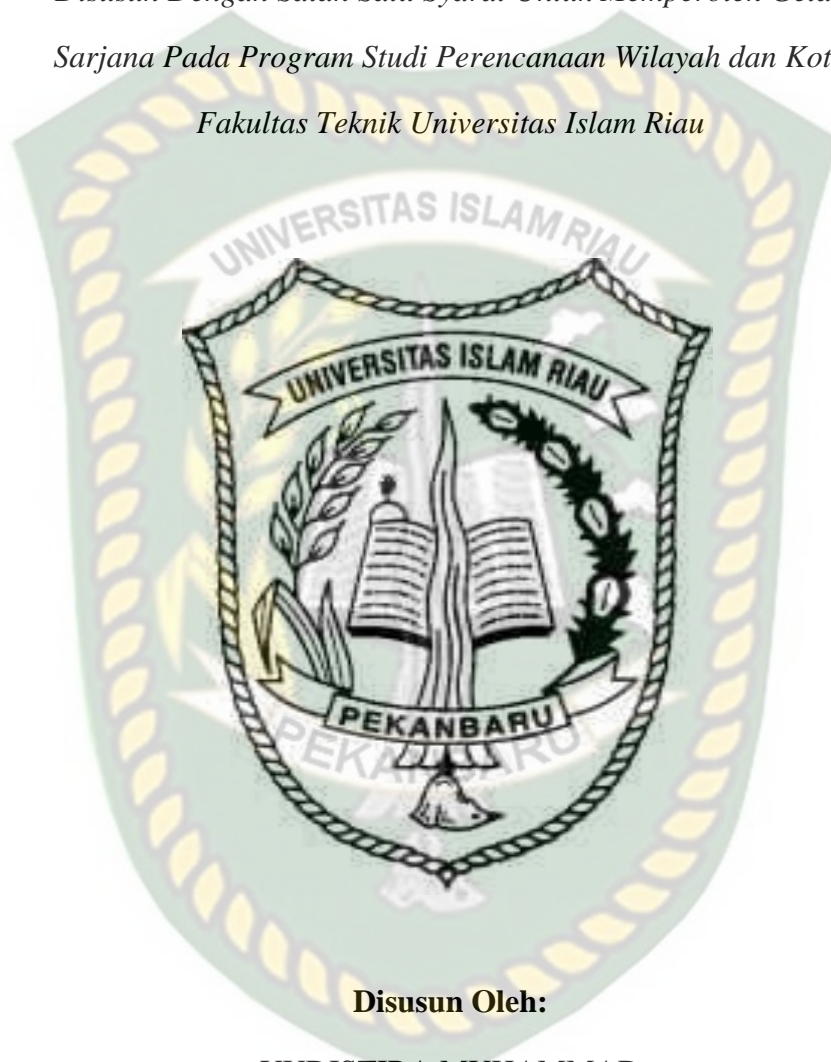


**STRATEGI PENGEMBANGAN PRASARANA JARINGAN
KECAMATAN KAMPAR**

TUGAS AKHIR

*Disusun Dengan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



Disusun Oleh:

**YUDISTIRA MUHAMMAD
133410354**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2020**

STRATEGI PENGEMBANGAN PRASARANA JARINGAN
KECAMATAN KAMPAR

TUGAS AKHIR

Dibuatkan Sebagai Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau



Oleh :

YUDISTIRA MUHAMMAD
133410354

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI PENGEMBANGAN PRASARANA JARINGAN
KECAMATAN KAMPAR

TUGAS AKHIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Disusun Oleh:
YUDISTIRA MUHAMMAD
NPM 103410354

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEKANBARU

PEMBIMBING II


Febby Asteriani, ST, MT


Rona Mulinna, ST, MT

Disahkan Oleh:

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Eng Muslim, ST, MT


Puji Astuti, ST, MT

Strategi Pengembangan Prasarana Jaringan

Kecamatan Kampar



NAMA : YEDISTIRA MUHAMMAD

NPM : 133410354

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudistira Muhammad
Tempat/ Tgl Lahir : Pauh, 02 Januari 1994
NPM : 133410354
Alamat : Koto Tibur
Kecamatan Kampar – Kabupaten Kampar

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada:

Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : S-1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini adalah Benar dan Asli dengan judul "**Strategi Pengembangan Prasarana Jaringan Kecamatan Kampar**".

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan/atau menuntut karena Tugas Akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulisan atau karya orang lain (**Plagiat**) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, September 2020



Yudistira Muhammad
133410354

STRATEGI PENGEMBANGAN PRASARANA JARINGAN KECAMATAN KAMPAR

YUDISTIRA MUHAMMAD

133410354

ABSTRAK

Pada kawasan Desa di kecamatan Kampar mempunyai beberapa permasalahan tentang sedikitnya realisasi pengembangan prasarana jaringan diantaranya : Jaringan air bersih seperti PDAM yang tidak merata, pada jalan desa prasarana jalan yang memudahkan penduduk mencapai tujuan masih perlu ditingkatkan karna kondisinya masih terdapat aspal rusak, pada jaringan drainase cukup banyak terdapat kondisi memperhatikan seperti belum dibuatnya gorong-gorong sehingga menyebabkan banjir.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan Taksonomi. Penelitian ini juga menggunakan data primer berupa observasi lapangan dan penyebaran wawancara serta data sekunder, berupa data instansi terkait yang diperlukan.

Dari penelitian ini temuan yang didapat yaitu aspek yang terkait kondisi prasarana meliputi keberadaan jalan, karakteristik drainase, dan karakteristik penyediaan air bersih. Berdasarkan hasil kesimpulan dari data sekunder, observasi, dan wawancara tiap sasaran menunjukkan bahwa pada prasarana jalan ini membutuhkan strategi mengatasi lubang dan kecelakaan terutama saat hujan tapi sebagian besar tergolong sedang / cukup memadai, pada prasarana drainase ini sudah ada sistemnya sendiri sehingga tergolong cukup memadai tapi membutuhkan penampung, pembagi, dan pembuang yang lebih kompleks, pada prasarana air bersih terdapat PDAM Tirta Kampar dan masyarakat sudah menerapkan berbagai alternatif air lainnya sehingga tergolong cukup memadai dan butuh perbaikan kondisi perpipaan PDAM, serta untuk kebijakan pemerintah dalam RKPD dan bidang cipta karya telah mengalokasikan berupa dana sehingga tergolong cukup memadai tapi masih ada yang tidak merata dan kurang nyaman sehingga terjadi permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan perlu adanya peningkatan seperti sumber daya manusia dan sumber daya sosial dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kunci : Infrastruktur, Kondisi, Air bersih, Jalan, Drainase

DEVELOPMENT STRATEGY NETWORK INFRASTRUCTURE KAMPAR DISTRICT

YUDISTIRA MUHAMMAD
133410354

ABSTRACT

In the village area in Kampar sub-district, there are a number of problems regarding the lack of realization of network infrastructure development including : Clean water networks such as PDAM that are uneven, the road network in this village road network infrastructure that makes it easy for residents to reach their destination still needs to be improved because the road conditions are still there are damaged asphalt conditions, in the drainage network there are quite a lot of poor conditions like a sewer has not been made, causing flooding.

This research used a descriptive qualitative methodology, and Taksonomi. This research used data primer contains field observation and giving data sekunder. That contains thye data of the institute that related to the research.

From this study the findings obtained are aspects related to the conditions of infrastructure including the existence of roads, drainage characteristics, and water supply characteristics. Based on the conclusions from secondary data, observations, and interviews for each target shows that the road infrastructure requires strategies to deal with potholes and accidents especially when it rains but most are classified as moderate / quite adequate, the drainage infrastructure already has its own system so it is quite adequate but requires a more complex container, divider, and waster, in the clean water infrastructure there is PDAM Tirta Kampar and the community has implemented various other water alternatives so that it is quite adequate and needs to improve the condition of the PDAM piping, as well as for government policies in the RKPD and the field of works, they have allocated funds in the form of sufficient funds but there are still uneven and uncomfortable so that problems occur. This shows that the quality of service needs to be improved such as human resources and social resources can be put to good use.

Keywords: Infrastructure, Condition, Clean water, Street, Drainage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah ia berikan sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Pengembangan Prasarana Jaringan Kecamatan Kampar” Ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi *huswatul hasanah* bagi setiap langkah umatnya.

Penulisan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu secara spiritual, maupun material, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Abd. Kudus Zaini, MT, MS, Tr selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam memberikan motivasi dan dorongan untuk dapat cepat menyelesaikan studi di Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota.
2. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, pengarahan dan masukan-masukan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Febby Asteriani, ST, MT selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, pengarahan dan masukan-masukan
4. Ibu Rona Muliana, ST, MT selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, pengarahan dan masukan-masukan
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik Khususnya Dosen Program Perencanaan Wilayah Dan Kota yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman- pengalaman selama peneliti mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staf TU Fakultas Teknik yang telah banyak membantu penulis.

7. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doanya serta semangatnya untuk penulis selama ini.
8. Sahabat – sahabat, rekan seperjuangan Planologi khususnya Planologi angkatan 2013 dan seluruh mahasiswa Planologi atas motivasi, doa dan kebersamaannya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kesehatan, umur yang panjang, serta keberkahan, dan keselamatan serta tetap selalu dalam lindungan-Nya. Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menulis penelitian ini, jika pembaca menemukan kekurangan dan kesalahan mohon diberikan kritik dan saran agar dapat menjadi lebih baik .

Pekanbaru, 2020
Penulis

Yudistira Muhammad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	Xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.4.1 Ruang Lingkup Materi.....	4
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Bagi Peneliti.....	8
1.5.2 Bagi Warga Masyarakat.....	8
1.5.3 Bagi Pemerintah.....	8
1.6 Posisi Penelitian dalam PWK.....	8
1.7 Kerangka Pikir	9
1.8 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Prasarana.....	12
2.2 Pengertian Prasarana Menurut Para Ahli	13
2.3 Jenis-Jenis Prasarana Jaringan.....	13
2.4 Prasarana Jalan.....	14
2.4.1 Klasifikasi Jalan	17
2.4.1.1 Klasifikasi Jalan Menurut Statusnya.....	17
2.4.1.2 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kewenangannya.....	18
2.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	19
2.5 Prasarana Drainase.....	19
2.5.1 Sistem Drainase.....	20
2.5.2 Kegunaan Drainase.....	21

2.5.3	Sarana Penunjang Drainase.....	22
2.5.4	Pola Aliran Drainase.....	22
2.6	Prasarana Air Bersih.....	23
2.6.1	Kebutuhan Air Bersih.....	24
2.6.2	Sistem Penyediaan Air Bersih.....	25
2.6.2.1	Unit Air Baku.....	25
2.6.2.2	Unit Produksi.....	25
2.6.2.3	Unit Distribusi dan Pelayanan	26
2.7	Kebijakan Pemerintah RKPD & Kebijakan Ciptakarya	27
2.8	Peraturan Bupati No.20 Tahun 2017.....	27
2.9	Peraturan Bupati No.12 Tahun 2017.....	28
2.10	Kriteria Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kampar....	28
2.11	Penelitian Terdahulu.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....

3.1	Pendekatan Metodologi Penelitian.....	32
3.2	Tahap Penelitian	33
3.2.1	Tahap Persiapan.....	33
3.3	Jenis Data.....	33
3.3.1	Data Primer.....	34
3.3.2	Data Sekunder.....	34
3.4	Lokasi Penelitian	34
3.5	Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	34
3.6	Sumber Data.....	34
3.7	Populasi dan sampel.....	35
3.7.1	Populasi.....	35
3.7.2	Sampel.....	35
3.8	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.9	Tahap Analisis.....	37
3.10	Metode Pengambilan Data.....	39
3.11	Tahap Penentuan Variabel.....	41

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	
4.1 Gambaran umum Kabupaten Kampar.....	45
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar.....	45
4.1.2 Letak Geografis & Luas Wilayah Kab. Kampar.....	46
4.1.3 Iklim	47
4.1.4 Topografi & Klimatologi.....	48
4.1.5 Morfologi.....	48
4.1.6 Geologi	48
4.1.7 Hidrologi.....	48
4.1.8 Keadaan Demografi.....	49
4.1.9 Kependudukan	49
4.1.10 Sosial Masyarakat.....	51
4.2 Gambaran Umum Prasarana Jaringan Kec. Kampar.....	52
4.2.1 Tentang Prasarana Kecamatan Kampar.....	52
4.2.2 Geografis dan Demografi.....	52
4.2.2.1 Batas Wilayah Desa.....	52
4.2.2.2 Luas Wilayah Kecamatan.....	53
4.2.2.3 Jumlah Penduduk.....	54
4.2.3 Keadaan Sosial	54
4.2.4 Struktur Mata Pencaharian.....	57
4.2.5 Kondisi Pemerintahan Desa.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
5.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Prasarana Jaringan.....	60
5.1.1 Kondisi Infrastruktur jalan.....	60
5.1.2 Kondisi Infrastruktur Drainase.....	72
5.1.3 Kondisi Infrastruktur Air Bersih.....	77
5.2 Kebijakan Pemerintah RKPD & Kebijakan Ciptakarya.....	85
5.3 Strategi Pengembangan Prasarana Jaringan.....	88
5.3.1 Hasil Taksonomi.....	89

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	
6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	100



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Kriteria Pembangunan Infrastruktur Daerah Kab. Kampar	28
Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1: Responden.....	36
Tabel 3.2: Informan Wawancara	37
Tabel 3.3: Analisis Taksonomi Matriks.....	39
Tabel 3.4: Variabel Penelitian	43
Tabel 3.5: Desain penelitian.....	44
Tabel 4.1: Luas Wilayah Kabupaten Kampar	47
Tabel 4.2: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan	50
Tabel 4.3: Luas, Jumlah Penduduk, & Kepadatan Penduduk Kecamatan....	51
Tabel 4.4: Luas Wilayah Kecamatan.....	53
Tabel 4.5: Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar.....	54
Tabel 4.6: Jumlah pendidikan Kecamatan Kampar.....	55
Tabel 4.7: Jumlah Sarana Kesehatan	55
Tabel 4.8: Pemenuhan Air Bersih	56
Tabel 4.9: Keagamaan Kecamatan Kampar	56
Tabel 4.10: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	57
Tabel 4.11: Nama Pejabat Struktur Pemerintahan Kecamatan Kampar.....	57
Tabel 4.12: Nama Kepala Desa Kecamatan Kampar.....	58
Tabel 4.13: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan.....	58
Tabel 4.14: Pembagian Wilayah	59
Tabel 5.1: Tingkat Kelayakan Jalan	60
Tabel 5.2: Tingkat Kebutuhan Jalan.....	61
Tabel 5.3: Hasil Kebutuhan Jaringan Jalan di Kecamatan Kampar	62
Tabel 5.4: Hasil Analisa & Pengelompokkan Zona Jalan Baru	62

Tabel 5.5: Hasil Analisa & Pengelompokkan Zona Pengaspalan.....	65
Tabel 5.6: Hasil Analisa & Pengelompokkan Zona Perbaikan Jalan.....	67
Tabel 5.7: Hasil Analisa & Pengelompokkan Zona Pemeliharaan Jalan.....	69
Tabel 5.8: Hasil Wawancara Responden Terhadap Jalan.....	71
Tabel 5.9: Kesimpulan Tiap Sub Bab Sasaran	72
Tabel 5.10: Kondisi Desain Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan.....	72
Tabel 5.11: Sistem Saluran Drainase.....	73
Tabel 5.12: Kondisi Saluran Sistem Drainase Bermasalah.....	74
Tabel 5.13: Hasil Wawancara Responden Terhadap Drainase	75
Tabel 5.14: Kesimpulan Tiap Sub Bab Sasaran	77
Tabel 5.15: Jumlah Kebutuhan Air Domestik Kecamatan Kampar	78
Tabel 5.16: Jumlah Pelanggan Tirta Kampar Kecamatan 2018-2019	81
Tabel 5.17: Kondisi Peralatan PDAM Tirta Kampar	82
Tabel 5.18: Penyebab Permasalahan PDAM Tirta Kampar	83
Tabel 5.19: Hasil Wawancara Responden Terhadap Air Bersih.....	84
Tabel 5.20: Kesimpulan Tiap Sub Bab Sasaran.....	84
Tabel 5.21: Pengelompokkan Kondisi Prasarana Bermasalah.....	86
Tabel 5.22: Hasil Wawancara Responden Terhadap Kebijakan RKPD.....	87
Tabel 5.23: Kesimpulan Tiap Sub Bab Sasaran.....	88
Tabel 5.24: Rangkuman Permasalahan Kondisi Prasarana & Kebijakan	88
Tabel 5.25: Matriks Taksonomi.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kampar	6
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Kampar	7
Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	10
Gambar 2.1 Struktur Saluran	20
Gambar 5.1 Kelayakan Jalan	61
Gambar 5.2 Tingkat Kebutuhan Jalan.....	61
Gambar 5.3 Pembuatan Jalan Baru Beberapa Kelurahan.....	63
Gambar 5.4 Peta Pembuatan Jalan Baru.....	64
Gambar 5.5 Pengaspalan/ <i>Paving</i> Beberapa Kelurahan.....	65
Gambar 5.6 Peta Pembuatan Jalan Aspal/ <i>Paving</i>	66
Gambar 5.7 Perbaikan Jalan Beberapa Kelurahan	67
Gambar 5.8 Peta Perbaikan Jalan	68
Gambar 5.9 Pemeliharaan Jalan Beberapa Kelurahan.....	69
Gambar 5.10 Peta Pemeliharaan Jalan	70
Gambar 5.11 Sebagian Drainase Bermasalah	74
Gambar 5.12 Peta Sebagian Drainase Bermasalah.....	76
Gambar 5.13 PDAM Tirta Kampar.....	77
Gambar 5.14 Peta Tingkat Kebutuhan Air Domestik.....	80
Gambar 5.11 Sistem PDAM Bermasalah.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan laut lebih dari 75 % yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, terdapat 17.500 pulau (Murdianto, 2004 dalam tresha, 2017) wilayah daratan dapat didefinisikan sebagai wilayah pertemuan ekosistem darat dalam suatu keseimbangan yang rentan . wilayah daratan merupakan kawasan yang sangat dinamis dari segi fisik, sosial, dan ekonomi. Wilayah daratan merupakan kawasan yang sangat kompleks yang mempunyai dinamika yang tinggi mengalami tekanan yang besar baik dari segi prospek fisik maupun aktivitas manusia (Marfai, 2015)

Kaitannya dengan analisis perencanaan kawasan darat dari seluruh aspek yang terdapat didalamnya seperti sumber daya alam harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan strategis untuk tujuan pemanfaatan multi guna. Seperti pengelolaan prasarana yang terintegrasikan dilakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengurangi rawan bencana dan kesenjangan sosial dan keterlambatan pertumbuhan ekonomi disuatu kawasan (Marfai, 2015)

Propinsi Riau terletak ditengah pulau sumatra yang mayoritas daerahnya adalah daratan yang sangat luas dan tempatnya sangat strategis dijangung pulau sumatra dengan luas wilayah 87.024 km. Propinsi Riau merupakan jalur penghubung antar daerah yang memiliki daerah yang ekonomis yang tinggi mempunyai banyak potensi (hidayat, 2010)

Kecamatan Kampar sebagai salah satu kecamatan di kabupaten Kampar yang terletak dipertengahan antara ibu kota propinsi riau dengan ibu kota kabupaten Kampar. Kecamatan Kampar Merupakan Kecamatan Yang Sangat Strategis. Kecamatan Kampar Sebagian Besar Merupakan Daerah Daratan 70%, Daerah Perbukitan 28% dan kemirigan. Luas Wilayah Kecamatan Kampar ± 142,9 Km². Kecamatan Kampar sampel akhir tahun 2015 penduduknya berjumlah 48.647 orang.

Pada kawasan Desa di kecamatan Kampar ini mempunyai beberapa permasalahan tentang belum adanya realisasi pengembangan prasarana jaringan meliputi diantaranya : beberapa lingkungan yang masih kurang tersedia seperti

pada jaringan air bersih belum tersedia nya penampungan untuk penggunaan keseluruhan desa seperti PDAM, pada jaringan jalan di desa ini prasarana jaringan jalan yang memudahkan penduduk untuk mencapai tujuan maka masih perlu ditingkatkan karna kondisi jalan masih terdapat kondisi aspal rusak, pada jaringan drainase cukup masih banyak terdapat kondisi yang memperhatikan seperti belum dibuatnya gorong-gorong sehingga menyebabkan banjir.

Berdasarkan UURI No. 1/2011 (tentang Perumahan dan Permukiman) diketahui jenis prasarana permukiman yang tercantum dalam Pasal 5 - 7, meliputi: 1. Sarana dasar utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah (Pasal 5): Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, pencegahan perambatan kebakaran, serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur; Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan; dan Jaringan saluran air hujan untuk pengatusan/drainase, dan pencegahan banjir setempat. Dalam keadaannya tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar. 2. Utilitas umum meliputi: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran.

Masalahnya tidak terjadi pelaksanaan / perkembangan prasarana di kecamatan Kampar dari segi jaringan prasarana, prasarana jalan, drainase, air bersih. Permasalahan yang mendasari penelitian ini diawali dari lingkungan setempat, dalam prosesnya ternyata tidak berkembang fasilitas dari prasarana tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, *Problem Statement* berdasarkan 5 tahun terakhir yang muncul adalah :

1. Kondisi Prasarana

Kondisi prasarana ini mengetahui yang belum dioptimalkan dalam pengembangan jaringan Drainase, Jalan, Air bersih, diantaranya :

- a) Kurangnya pengoperasian untuk mendukung pembangunan
- b) Kurangnya sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan
- c) Belum sadarnya sebagian masyarakat terhadap perlunya konservasi
- d) Partisipasi masyarakat penduduk lokal yang masih bisa diperhitungkan
- e) SDM dan SDA tidak berjalan selaras dalam menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan.

2. Kebijakan Pemerintah perencanaan Prasarana

Dalam hal ini mengetahui *problem* yang ada, sehingga belum dioptimalkan dalam pengembangan prasarana yakni :

- a) Penguatan kelembagaan yang masih dikatakan rendah dalam pengembangan prasarana
- b) Dukungan pemerintah yang masih sedikit dalam hal pengembangan prasarana
- c) Partisipasi *stakeholder* yang masih bisa diperhitungkan dalam pengembangan infrastruktur prasarana.

3. Strategi perencanaan pengembangan prasarana

Strategi pembangunan prasarana untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya produktif. Pengembangan Prasarana masih membutuhkan strategi-strategi yang ada untuk masa yang akan datang. Masih adanya kekurangan dalam penerapan strategi yang ada di kawasan ini yakni:

- a) Belum adanya semenisasi
- b) Kurangnya strategi bantuan dari berbagai pihak
- c) Kurangnya strategi pengembangan dan penambahan prasarana, seperti jalan, drainase, air bersih.

Dengan demikian, strategi ini mengarah kepada penguatan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efektif terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal.

Pengembangan prasarana jaringan di kecamatan Kampar tentu hal tersebut merupakan suatu wujud aktivitas perubahan lahan dengan peruntukan fasilitas publik. Adanya prasarana jaringan dapat meningkatkan kawasan permukiman, industri dan jasa, serta meningkatkan sosial ekonomi (*Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kampar, 2017*)

Kajian terhadap dampak suatu pengembangan prasarana jaringan diperlukan agar masyarakat langsung dapat merasakan manfaat dari pengembangan prasarana jaringan disuatu wilayah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan skripsi yang berjudul “ *Pengembangan Prasarana Jaringan Kecamatan Kampar*”. Hal ini tentu tidak lepas dari realita masyarakat dan gejala-gejala yang ditimbulkan dari pengembangan prasarana jaringan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang mendasari penelitian ini diawali dari lingkungan setempat, dilihat dari perkembangannya bahwa fasilitas prasarana hanya sebagian yang optimal, maka pernyataan penelitian atau *Research Question* yang muncul yakni :

1. Bagaimana kondisi prasarana desa-desa di kecamatan Kampar?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perencanaan prasarana kecamatan Kampar?
3. Bagaimana strategi perencanaan pengembangan prasarana di desa-desa kecamatan kampar?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Perumusan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi perencanaan pengembangan prasarana di desa-desa kecamatan Kampar. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi kondisi prasarana desa di kecamatan Kampar.
2. Menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perencanaan prasarana kecamatan Kampar
3. Merumuskan strategi perencanaan pengembangan prasarana di desa-desa kecamatan kampar.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam studi ini dibatasi karakteristik wilayah studi yaitu kawasan Prasarana di Kecamatan Kampar. Materi yang akan dibahas dalam studi ini akan dibatasi dengan materi tentang *Prasarana Jaringan*, dan perencanaan pengembangan prasarana jaringan. Adapun pembahasan materi tersebut adalah

1. Akan dijelaskan mengenai kondisi dalam lingkup kecamatan kampar, yang dimaksud berupa komponen variabel dalam pengembangan CBT diantaranya :
 - a) Kondisi prasarana, meliputi : Jalan, Drainase, dan Air Bersih.
2. *Perencanaan Prasarana Jaringan* merupakan salah satu langkah dalam pengembangan dan perkembangan prasarana di kecamatan kampar. Dalam

penelitian ini sasaran yang dijabarkan selanjutnya yakni kebijakan pemerintah tentang perencanaan prasarana kecamatan Kampar, dengan variabel diantaranya :

- a) Kebijakan pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan arah kebijakan bidang cipta karya sesuai kebutuhan anggaran. Dalam hal ini diharapkan dapat memperlihatkan bentuk keterlibatan seluruh aparat pemerintah dan dampak yang ditimbulkan dari keterkaitan tersebut.
- b) Merumuskan strategi terkait dengan karakteristik prasarana, dengan variabelnya strategi pengembangan

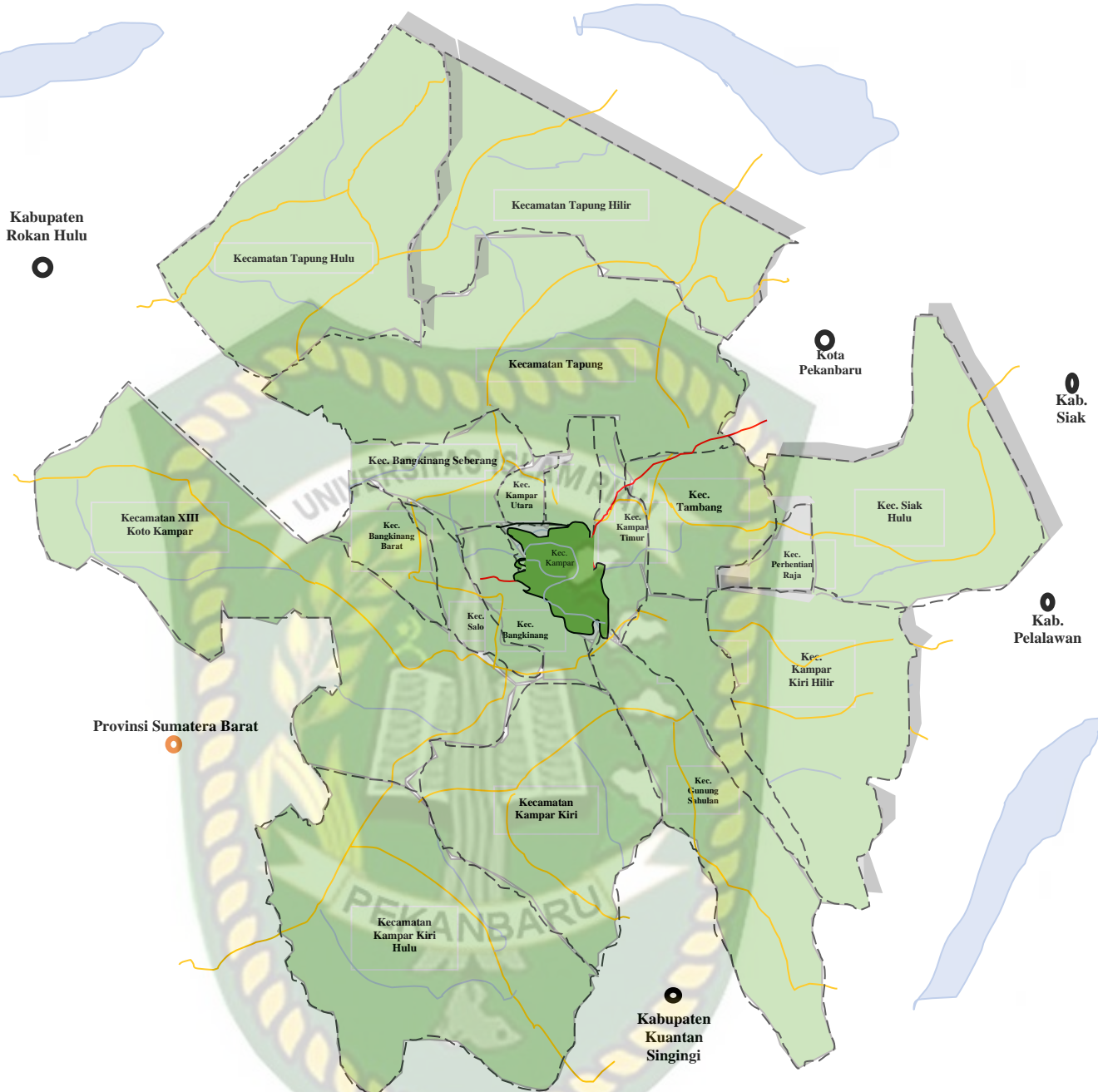
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah prasarana jaringan yang berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Luas wilayah Kecamatan Kampar 99,66 KM² serta berada pada ketinggian 30-40 M di atas permukaan Laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Kota.

Bentuk gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta berikut ini.

667250 700617 733078 767334 800693



**TEKNIK PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS ISLAM
RIAU**

**Peta Administrasi
Kedudukan Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar**

Insert Kawasan



KETERANGAN :

- Kab/Kota
- Provinsi
- Jaringan Jalan :
 - Arteri Primer
 - Kolektor Primer
 - Lokal Primer
- Perairan / Sungai
- Kawasan Non /Permukiman
- Batas Kecamatan



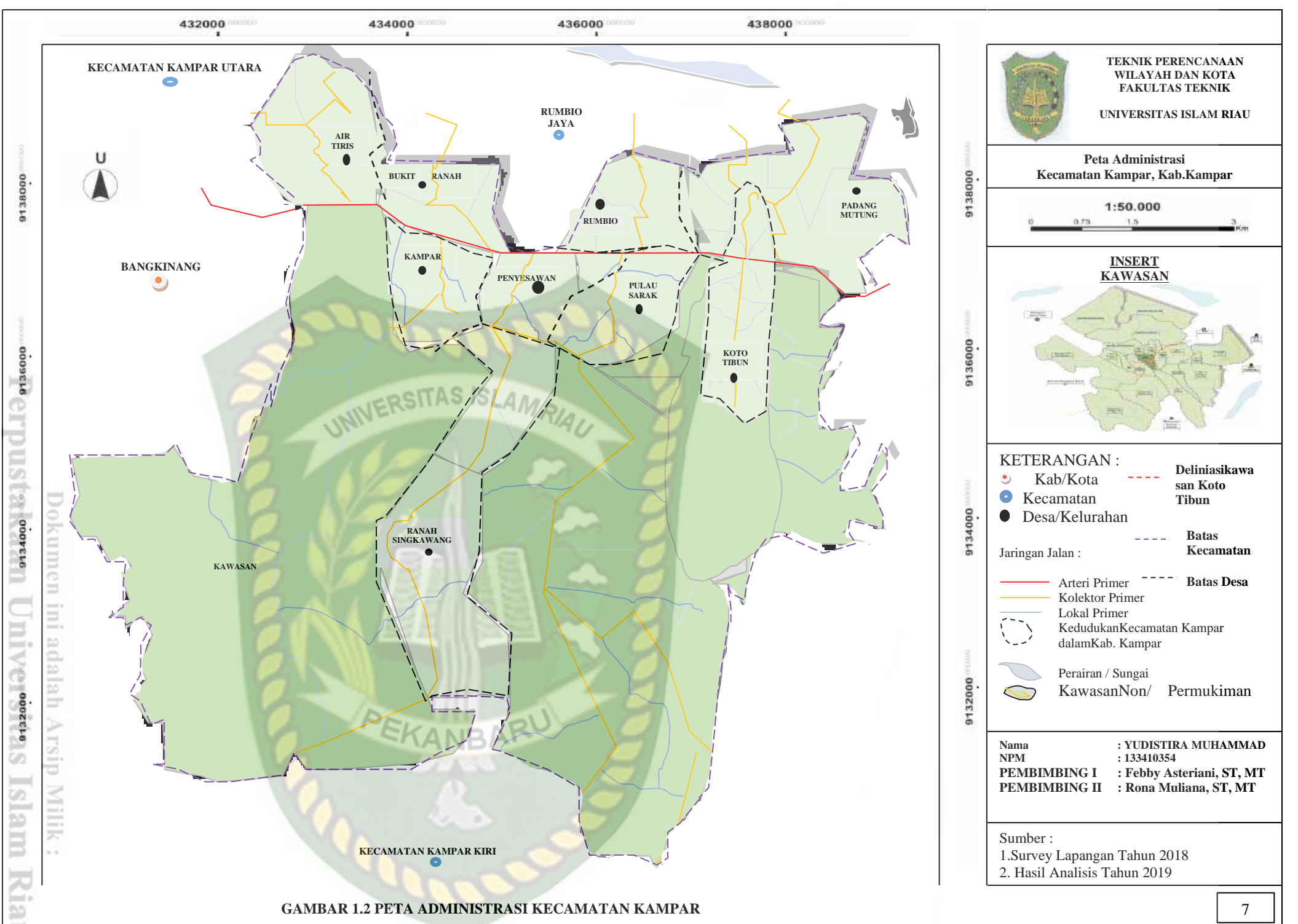
Nama : YUDISTIRA MUHAMMAD
 NPM : 133410354
 PEMBIMBING I : Febby Asteriani, ST, MT
 PEMBIMBING II : Rona Muliana, ST, MT

Sumber :
 1. Survey Lapangan Tahun 2018
 2. Hasil Analisis Tahun 2019


667250 700617 733078 767334 800693

GAMBAR 1.1 PETA ADMINISTRASI KEDUDUKAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR








Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



**Peta Administrasi
Kecamatan Kampar, Kab.Kampar**

1:50.000




- KETERANGAN :**
-  Kab/Kota
 -  Kecamatan
 -  Desa/Kelurahan
 -  Deliniasikawa
san Koto
Tibun
 -  Batas
Kecamatan
 -  Batas Desa
- Jaringan Jalan :
-  Arteri Primer
 -  Kolektor Primer
 -  Lokal Primer
 -  KedudukanKecamatan Kampar
dalamKab. Kampar
 -  Perairan / Sungai
 -  KawasanNon/ Permukiman

Nama : YUDISTIRA MUHAMMAD
NPM : 133410354
PEMBIMBING I : Febby Asteriani, ST, MT
PEMBIMBING II : Rona Muliana, ST, MT

Sumber :
 1. Survey Lapangan Tahun 2018
 2. Hasil Analisis Tahun 2019

GAMBAR 1.2 PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KAMPAR

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Bagi Peneliti

- a. Membantu peneliti untuk mengetahui dan memahami deskripsi pengembang perencanaan prasarana jaringan pada kecamatan kampar, Kabupaten Kampar.
- b. Memperoleh pengalaman nyata dan mengetahui secara langsung situasi dan kondisi yang nantinya akan menjadi bidang garapan serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dibangku perkuliahan.

1.5.2 Bagi Warga Masyarakat

- a. Sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam upaya pengembangan prasarana jaringan.
- b. Mengetahui strategi-strategi dalam pengembangan perencanaan prasarana jaringan.

1.5.3 Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan landasan dalam penentuan kebijakan mengenai pengembangan perencanaan prasarana jaringan serta wawasan pengetahuan pembangunan manusia melalui program pengembangan prasarana.

1.6 Posisi Penelitian Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota

Prasarana merupakan pembangunan yang berkelanjutan dan sangat terkait dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota, yang membahas tentang bagaimana sebuah proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan kesesuaian dari sumber daya, khususnya tema yang di ambil. Prasarana tersebut merupakan salah satu sektor pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan melibatkan masyarakat didalamnya, dan telah dicanangkan sesuai dengan program yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan sama dengan tujuan pembangunan nasional.

Posisi penelitian dalam bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota adalah sebagai salah satu cara atau proses mengidentifikasi dalam suatu sektor pembangunan yang berkelanjutan dengan cara mengidentifikasi permasalahan

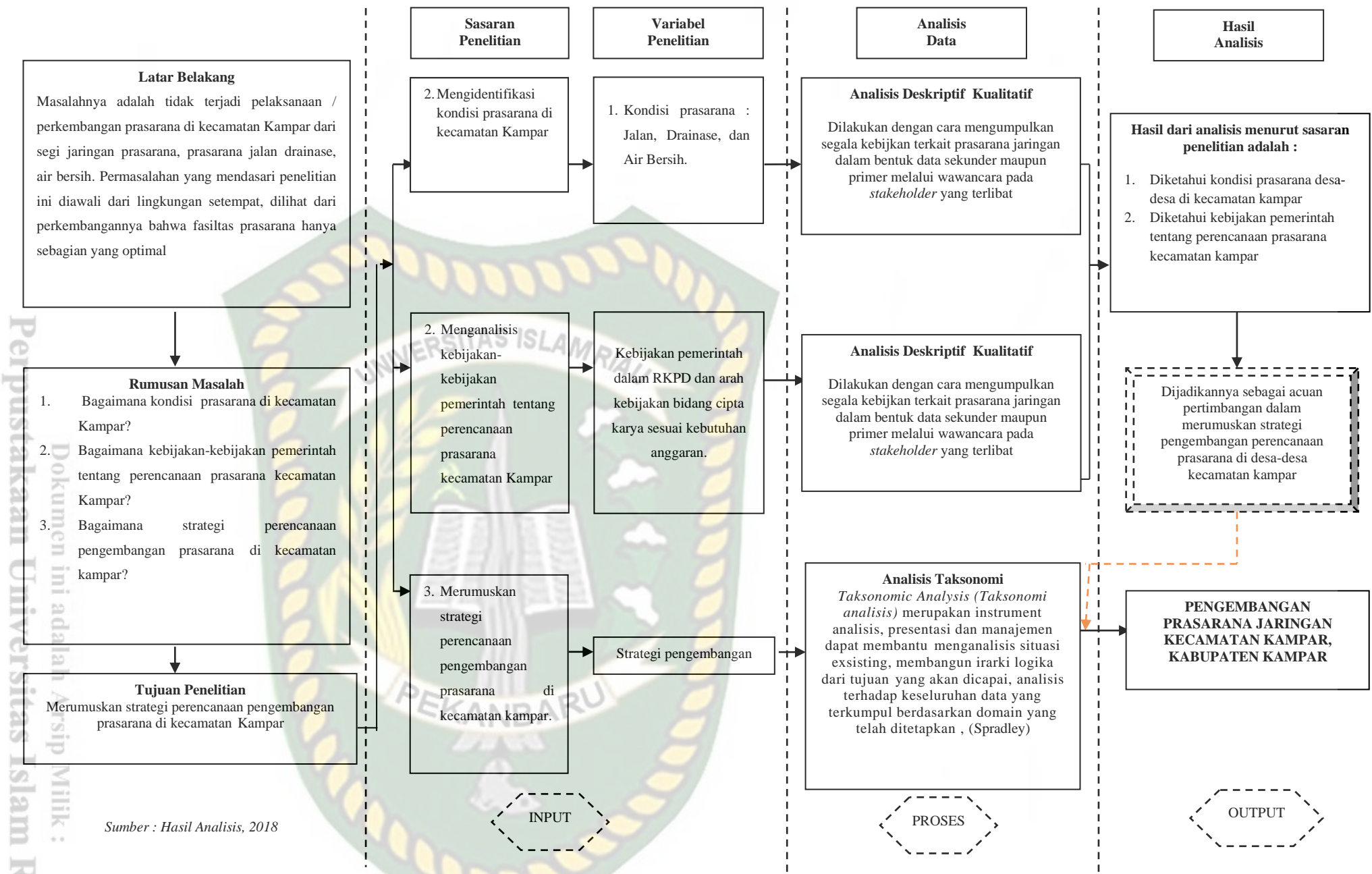
yang ada, sehingga dapat memberikan evaluasi baru. Dengan adanya penelitian yang dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai penelitian yang layak, karena dapat menghasilkan suatu realita *demand* dan *supply* sehingga dapat, dan diharapkan bermanfaat bagi ilmu perencanaan wilayah dan kota

1.7 Kerangka Pikir

Wilayah Kabupaten Kampar semakin lama kian banyak menjadi perhatian pengunjung, sehingga perlu adanya pengembangan dari perencanaan prasarana Kabupaten Kampar sangat besar karena dukungan letak geografis di jalur singgah atau *rest area* dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Berkaitan dengan potensi alam yang dimiliki, Adapun rumusan masalah seperti :

1. Bagaimana kondisi prasarana desa di kecamatan Kampar ?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perencanaan prasarana kecamatan Kampar ?
3. Bagaimana strategi perencanaan pengembangan prasarana di desa kecamatan Kampar ?

Dari ketiga perumusan masalah diatas akan dikaji dan didasarkan dengan beberapa konsep, teori serta akan dianalisis dengan metode Deskriptif Deduktif Kualitatif.



Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan mengenai studi prasarana ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang studi, perumusan masalah, tujuan, sasaran, dan manfaat studi, ruang lingkup, keaslian penelitian, posisi penelitian dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, kerangka pikir, sistematika penyusunan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan dari studi pengembangan perencanaan prasarana jaringan kecamatan Kampar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Berisi tentang pembahasan materi prasarana yang disesuaikan dengan teori-teori pada kajian literatur sebagai penyusunan. Dalam kajian literatur ini terdapat pengertian prasarana dan, jenis prasarana, dan pengembangan prasarana.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka acuan penelitian, teknik analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini membahas tentang gambaran umum kabupaten kampar, sejarah letak geografis, topografi, morfologi, geologi, demografi, kependudukan, sosial masyarakat, gambaran umum kecamatan kampar, (keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi pemerintahan desa).

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian & pembahasan yang berisi karakteristik responden, tentang prasarana, kondisi prasarana pengembangan, kebijakan pemerintah, hasil identifikasi wawancara terhadap responden pada pengembangan perencanaan prasarana jaringan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan hasil keseluruhan mengenai kondisi, kebijakan pemerintah, serta strategi yang dilakukan untuk pengembangan perencanaan prasarana jaringan kecamatan Kampar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prasarana

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata Prasarana: segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb). Sedangkan sarana: segala sesuatu (dapat berupa syarat atau upaya) yang sapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pengertian sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah yakni Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun Ayat tentang prasarana ini terdapat dalam surah an-Nahl ayat 68 dan 69 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعَلِ أَنْ أَعْبُدِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Q.S. An-Nahl : 68-69)

2.2 Pengertian Prasarana Menurut Para Ahli

a. Menurut Moenir (2002:119)

Pengertian prasarana menurut Moenir diatas jelas memberi petunjuk merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah peralatan pembantu ataupun peralatan utama, keduanya alat tersebut berfungsi mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai.

b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

c. Menurut Hamalik (2000:23)

Prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebarkan ide, sehingga ide tersebut bias sampai pada penerima.

d. Menurut Depdiknas (2008:37) dalam Barnawi dkk, (2012:47-48)

Prasarana adalah semua perangkat yang secara langsung digunakan dalam proses porogram kerja.

e. Menurut Soepartono (2006:699)

Prasarana adalah suatu kegiatan yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kinerja yang meliputi bagan bangunan beserta perlengkapan untuk melaksanakan proses.

f. Menurut PP No.14 Tahun 2006

Managemen rekayasa lalu lintas yakni berkaitan dengan pengaturan lalulintas yang diperuntukkan untuk mengembangkan prasarana yang dibuat sehingga dapat memaksimalkan dengan adanya konsep-konsep seperi mempercepat proses pelaksanaan, meningkatkan produktivitas, ketepatan susunan stabilitas, dan hasil berkualitas.

2.3 Jenis –Jenis Prasarana Jaringan

Berdasarkan UURI No. 1/2011 (tentang Perumahan dan Permukiman) dapat diketahui berbagai jenis prasarana permukiman seperti yang tercantum dalam Pasal 5 - 7, meliputi:

1. Sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah (Pasal 5):
 - a. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, pencegahan perambatan kebakaran, serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur;
 - b. Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan; dan
 - c. Jaringan saluran air hujan untuk pengatusan/drainase, dan pencegahan banjir setempat. Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.
2. Utilitas umum meliputi antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. Fasilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat (Pasal 7).

2.4 Prasarana Jalan

Pengertian prasarana jalan dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 di katakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya Prasanana disini meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

- a. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- b. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
- c. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian system jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
- d. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi peraturan pembinaan, pembagunan dan pengawasan jalan.
- e. Pengaturan jalan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang- undangan jalan.

Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat utama dalam mendukung pergerakan, baik pergerakan manusia atau barang. Sistem transportasi jalan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap sistem transportasi darat maupun sistem transportasi secara ke seluruh.

Dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2014 di sebutkan bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan serta kebersamaan dan kemitraan.

Selanjutnya di sebutkan tujuan dari penyelenggaraan jalan adalah untuk:

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan untuk masyarakat.
3. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta serta berpihak pada kepentingan rakyat.
4. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu dan
5. Mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Prasarana jalan digunakan sebagai sarana lalu lintas untuk melayani pergerakan manusia atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Ketersediaan prasarana jalan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mendukung berkembangnya suatu wilayah yang ditandai dengan lancarnya distribusi pergerakan manusia, barang dan jasa sehingga kegiatan perekonomian wilayah tersebut menjadi lebih maju.

Manfaat prasarana jalan dalam perkembangan dan pembangunan bersifat multidimensi. Terdapat dua manfaat utama dari prasarana jalan, yaitu:

- a. Membuka keterisolasian suatu wilayah atau daerah. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran roda perekonomian suatu daerah atau wilayah.
- b. Mempermudah akses teknologi dan pemanfaatan sosial bagi masyarakat.

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa

distribusi yang terwujud dalam pusat-pusat kegiatan, sedang sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Keberadaan jalan tidak lepas dari yang namanya kebutuhan, adapun kebutuhan jalan merupakan penerapan untuk menghasilkan ketercapaian dalam rangka meningkatkan kualitas struktur jalan termasuk dalam ruang milik jalan (Rumija) PP No. 34 Tahun 2006 Tentang kelas jalan dan kebutuhan akan ruang milik jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan bebas hambatan (dalam Guha, 2008) :

a. Kebutuhan jalan baru

Pembuatan jalan baru yang nantinya berdampak pada sistem aktivitas masyarakat guna realisasi jalan jalan yang belum dibuat.

b. Pengaspalan jalan sedang

Kategori jalan yang akan direncanakan untuk pengerasan yakni jalan yang bermasalah terhadap struktur jalan sehingga realisasi guna membuat aktivitas masyarakat berjalan lancar.

c. Perbaikan jalan bebas hambatan

Jalan merupakan prasarana yang berkepanjangan dalam sistematika infrastruktur sehingga perbaikan-perbaikan jalan dibutuhkan untuk menghindari dampak.

d. Pemeliharaan jalan raya

Kategori jalan yang baik akan memudahkan moda transportasi darat guna aktivitas masyarakat sehingga jalan yang sudah dibuat akan tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya.

Fasilitas pelengkap jalan berdasarkan hukum dan Undang- Undang No. 38

Tahun 2014

a. Trotoar

Trotoar adalah fasilitas tepi jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, trotoar ditinggikan untuk melindungi pejalan kaki dari lalu lintas kendaraan, sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan yang ada.

b. Lampu jalan

Adalah yang berfungsi untuk penerangan jalan untuk menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keamanan pengguna jalan, sehingga

masyarakat lebih paham tentang adanya peraturan yang sudah diterapkan oleh pihak-pihak terkait.

c. Rambu lalu lintas

Merupakan perangkat komunikasi antara jalan dengan pengguna dengan menggunakan lambang, angka dan tulisan berupa perintah, larangan, petunjuk dan peringatan, sehingga masyarakat paham tentang aturan dengan konsep-konsep yang sudah ditetapkan.

d. Marka jalan

Adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas, sehingga mengurangi angka laka lintas yang ada dan masyarakat akan tahu keberadaan tentang marka jalan ini.

e. Tempat perhentian bus

Adalah halte bus tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus, sehingga masyarakat mudah untuk melakukan berbagai aktivitas yang mereka lakukan.

2.4.1 Klasifikasi Jalan

2.4.1.1 Klasifikasi Jalan Menurut Statusnya

Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya dibagi menjadi lima kelompok yaitu jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa. Berdasarkan UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 9, jalan umum berdasarkan statusnya dapat dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pengelompokkan status jalan tersebut bertujuan agar semua ruas jalan yang ada di Indonesia akan habis terbagi ke setiap status kewenangan pembinaan jalan. Dengan kata lain, tidak ada jalan yang tidak jelas penanggungjawabannya untuk membangun, memelihara, dan mengoperasikannya.

Pelaksanaan dari fungsi setiap ruas jalan dalam kewenangan status jalan tertentu, maka diperlukan adanya sinkronisasi antara fungsi dan status jalan, sehingga setiap level pemerintahan (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota) akan mengurus jalan dalam statusnya sesuai dengan fungsi yang memang benar-benar dibutuhkan.

2.4.1.2 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kewenangan Pembinaan

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 1 ayat (9), penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pembinaan, pengaturan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Menurut Adisasmita (2011:140-141), klasifikasi berdasarkan kewenangan pembinaan:

1. Jalan nasional yaitu ruas jalan yang karena tingkat kepentingannya, kewenangan peembiannya berada pada pemerintah pusat. Ruas jalan yang termasuk kedalam klasifikasi ini adalah:
 - a. Jalan Arteri Primer
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
 - c. Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional.
2. Jalan propinsi yaitu ruas jalan yang berdasarkan tingkat kepentingannya, kewenangan pembinaannya diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat. Adapun yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah:
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten, propinsi dengan ibukota kabupaten/kotamadya.
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota.
 - c. Jalan yang ada di dalam daerah khusus ibukota Jakarta, kecuali yang ditetapkan sebagai jalan nasional.
 - d. Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari segi kepentingan propinsi
3. Jalan kotamadya/kabupaten yaitu ruas jalan yang berdasarkan tingkat kepentingan, kewenangan pembinaanya diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II. Adapun yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah:
 - a. Jalan Lokal Primer.
 - b. Jalan Kolektor Primer yang tidak masuk ke dalam baik jalan nasional maupun jalan propinsi.
 - c. Jalan khusus yaitu jalan yang berdasarkan tingkat kepentingannya bersifat khusus maka kewenangan pembinaannya diserahkan kepada instansi/badan hukum atau perseorangan yang membangun dan mengelola jalan tersebut.

- d. Jalan Sekunder yang tidak masuk ke dalam baik jalan nasional maupun jalan propinsi.
- e. Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari segi kepentingan kabupaten atau kotamadya.

2.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM jalan didefinisikan sebagai ukuran teknis fisik jalan yang sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, yang harus dicapai oleh setiap jaringan jalan dan ruas-ruas jalan yang ada didalamnya, dalam kurun waktu yang ditentukan, melalui penyediaan prasarana jalan (Iskandar, 2011). Ada 3 (tiga) indikator sebagai kriteria SPM jaringan jalan:

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu pusat kegiatan (PK) atau simpul-simpul kegiatan di dalam wilayah yang dilayani jalan. Dievaluasi dari keterhubungan antar pusat kegiatan oleh jalan dalam wilayah yang dilayani jalan dan diperhitungkan nilainya terhadap luas wilayah yang dilayani.

2. Mobilitas

Mobilitas adalah ukuran kualitas pelayanan jalan yang diukur oleh kemudahan per individu masyarakat melakukan perjalanan melalui jalan untuk mencapai tujuannya. Ukuran mobilitas adalah panjang jalan dibagi oleh jumlah orang yang dilayaninya.

3. Keselamatan

Keselamatan dalam konteks pelayanan adalah keselamatan pengguna jalan melakukan perjalanan melalui jalan dengan segala unsur pembentuknya, yaitu pengguna jalan, kendaraan (sarana), dan jalan dengan kelengkapannya (bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan), serta lingkungan jalan.

2.5 Prasarana Drainase

Drainase merupakan suatu system yang tidak hanya untuk menyalurkan air hujan, tetapi untuk limbah rumah tangga maupun limbah pabrik system ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat apalagi, didaerah yang berpenduduk padat. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai system guna merupakan komponen penting

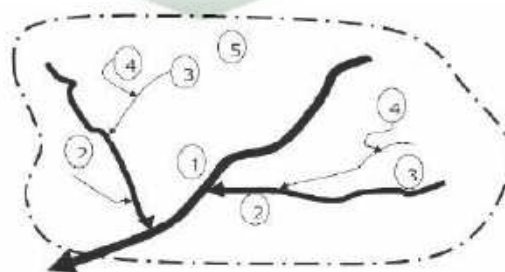
dalam perencanaan secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan (Widjaya, 2013)

Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan yang aman nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase dalam berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai kebutuhan air permukaan dan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir (soetomo, 2010).

2.5.1 Sistem Drainase

Menurut Maryono (2014), sistem drainase dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam sistem dan ditambah dengan pengendalian banjir (*food control*), sistem tersebut adalah:

1. Sistem Jaringan Drainase Utama (*Major Urban Drainage System*), berfungsi mengumpulkan aliran air hujan dari minor drainase sistem untuk diteruskan ke badan air (sungai yang melalui daerah pemerintahan dan kabupaten, seperti: waduk, rawa-rawa, sungai dan muara laut untuk di tepi pantai).
2. Drainase Lokal (*Minor Urban Drainage System*), adalah jaringan drainase yang melayani bagian-bagian khusus perkotaan seperti kawasan real estate, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkampungan, kawasan kompleks-komplek, perumahan dan lain-lain.
3. Struktur saluran, secara hirarki drainase mulai dari yang paling hulu akan terdiri dari: saluran kwarter/saluran kolektor jaringan drainase lokal, saluran tersier, saluran sekunder dan saluran primer dapat dilihat pada Gambar 1.



Keterangan:
 1. Saluran primer 3. Saluran tersier 5. Batas daerah pengalihan
 2 Saluran Sekunder 4. Kwartir

Gambar 2.1 Struktur Saluran
 Sumber : Maryono, 2014

Karakteristik drainase dilakukan upaya penyusunan kriteria desain drainase kawasan permukiman kota berwawasan lingkungan, bahan-bahan utama penyusunan diambil dari Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase Permukiman Perkotaan Ramah Lingkungan. Sub Kegiatan Kriteria Desain Drainase Ramah Lingkungan Kawasan Permukiman (Sarbidi, dkk, 2013). Berdasarkan laporan sistem drainase (Sarbidi dan Edinur, 2013) diketahui bahwa drainase berwawasan lingkungan terdiri atas drainase lokal dan drainase utama, yaitu :

- a. Sistem penampungan dengan : kolam retensi, kolam detensi (*bouzem*), bendung pengendali banjir (Bendali) serta *polder* untuk pengendalian banjir.
- b. Sistem peresapan digunakan : sumur resapan air hujan dan lainnya.
- c. Sistem pemanfaatan air hujan dengan penampungan air hujan.

2.5.2 Kegunaan Drainase

Menurut Sukarto (2009), ada beberapa kegunaan drainase, selain untuk pengeringan tanah atau menghambat terjadinya banjir, drainase dapat berfungsi untuk pertanian, bangunan, kesehatan, dan lansekap

1. Pertanian

Tanah yang terlalu basah seperti rawa misalnya tidak dapat ditanami. Untuk dapat digunakan sebagai lahan pertanian, tanah rawa yang selalu basah perlu dikeringkan.

2. Bangunan

Untuk mendirikan bangunan (gedung, jalan dan lapangan terbang) di atas tanah yang basah perlu drainase, agar tanah menjadi kering dan daya dukung tanah menjadi bertambah sehingga dapat mendukung beban bangunan di atasnya.

3. Kesehatan

Tanah yang digenangi air dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk, sehingga perlu dikeringkan dengan sistem jaringan drainase. Pada tanah kering telur dan larva nyamuk tidak hidup. Sedangkan dari ilmu kesehatan gas-gas yang terdapat di rawa seperti gas metan tidak baik untuk kesehatan, sehingga tanah sekitar permukiman perlu dikeringkan.

2.5.3 Sarana Penunjang Bangunan Drainase

Menurut sumber dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) ada beberapa sarana penunjang bangunan drainase:

1. Lubang air pada dinding saluran (*wheep hole*) yaitu lubang yang berfungsi untuk mengalirkan air resapan yang berasal dari tanah sekitar saluran drainase, sehingga tanah tidak menjadi berlumpur.
2. Lubang air pada trotoar (*street inlet*) yaitu lubang yang berfungsi untuk mengalirkan air yang berasal dari jalan yang beraspal sehingga tidak terjadi genangan air/banjir.
3. Saringan sampah kasar (*bar screen*) yaitu saringan sampah yang diletakkan sebelum terdapatnya kantong lumpur atau pasir sehingga sampah yang berukuran besar tidak dapat masuk ke dalam kantong lumpur atau pasir.
4. Saringan sampah halus (*fine screen*) yaitu saringan sampah yang mempunyai ukuran lebih kecil dari pada ukuran saringan sampah kasar di letakkan pada gorong-gorong (*box culvert*) sehingga sampah yang mempunyai ukuran kecil tidak dapat masuk kedalam gorong-gorong.
5. Penutup atas parit (*cover slab*) yaitu struktur beton bertulang yang diletakkan di atas bangunan drainase. Umumnya penutup parit ini digunakan pada daerah perkotaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan untuk pembuatan trotoar.

2.5.4 Pola Aliran Drainase

Penggolongan jenis aliran berdasarkan perubahan kedalaman aliran sesuai dengan perubahan ruang dan waktu di bagi dua, yaitu aliran tunak (*steady flow*) dan aliran tidak tunak (*unsteady flow*).

1. Aliran tunak (*steady flow*). Aliran tunak adalah aliran yang mempunyai kedalaman tetap untuk selang waktu tertentu. Aliran tunak diklasifikasikan menjadi:
 - a) Aliran seragam (*uniform flow*). Aliran saluran terbuka dikatakan seragam apabila ke dalam air sama pada setiap penampang saluran.
 - b) Aliran berubah (*varied flow*). Aliran saluran terbuka dikatakan berubah secara lambat apabila kedalaman air berubah di sepanjang saluran. Aliran berubah terdiri dari dua macam yaitu aliran berubah secara

lambat apabila kedalaman aliran berubah secara lambat dan aliran berubah secara cepat apabila kedalaman aliran berubah secara cepat.

2. Aliran tidak tunak (*unsteady flow*). Aliran tidak tunak adalah aliran yang mempunyai kedalaman tidak tetap untuk selang waktu tertentu. Aliran tidak tunak diklasifikasikan menjadi:
 - a) Aliran seragam tidak tunak (*unsteady uniform flow*). Aliran saluran terbuka dimana alirannya mempunyai permukaan yang berklasifikasi waktu dan tetap sejajar dengan dasar saluran. Aliran seperti ini jarang ditemukan di lapangan.
 - b) Aliran berubah tidak tunak (*unsteady varied flow*). Aliran saluran terbuka dimana kedalaman aliran berubah sepanjang waktu dan ruang. Aliran berubah tidak tunak terdiri dari dua macam yaitu aliran yang berubah secara lambat dimana kedalaman aliran berubah sepanjang waktu dan ruang dengan perubahan kedalaman secara lambat, serta aliran tidak tunak berubah secara cepat dimana kedalaman aliran berubah sepanjang waktu dan ruang dengan perubahan kedalaman secara cepat.

2.6 Prasarana Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. (*Radiana Triatmadja, 2008*).

Air bersih yang digunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik untuk konsumsi sesuai dengan standar air minum di Indonesia yaitu PP No.82 Tahun 2011 dan KepMen No.907 Tahun 2012. Begitu pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia, sehingga memungkinkan penyediaan menjadi terbatas bila pemanfaatannya tidak diatur dengan baik, sehingga harus dibuat suatu jaringan perpipaan yang tertata baik untuk mendistribusikan air bersih secara merata kesetiap konsumen.

Penyediaan air bersih dalam perencanaan dan pengembangannya terdapat unsur fungsional dalam sistem penyediaan air bersih oleh (Tri Joko, Unit Air Baku dalam sistem penyediaan air minum, 2015) diantaranya :

a. Sumber Air

Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah mata air, sungai, rawa, danau, waduk, dan muara.

b. Reservoir/ Prasedimentasi

Suatu sistem penyediaan air yang mampu menyediakan air yang dapat diminum dalam jumlah yang cukup merupakan hal yang penting bagi suatu daerah. Unsur-unsur yang membentuk suatu sistem penyediaan air meliputi : sumber-sumber penyediaan, sarana-sarana penampungan, sarana penyaluran (dari pengolahan), tampungan sementara, serta sarana-sarana distribusi.

c. Transmisi Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan debit baik penampungan sementara maupun untuk ke sambungan langsung maka dipermudah dengan melalui jaringan perpipaan.

d. Pompa / Pengolahan

Pompa yang digunakan untuk mengangkut air dari sumber air berupa mesin yang mewadahi masyarakat dalam hal penyediaan air.

e. Jaringan Distribusi

Jaringan distribusi adalah sistem jaringan yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang mempunyai fungsi pokok mendistribusikan air yang telah memenuhi syarat ke seluruh daerah pelayanan. Sistem jaringan distribusi ini meliputi unsur sistem perpipaan dan perlengkapannya, pipa primer, pipa sekunder, pipa tersier, pipa dinas, dan pipa parsial.

2.6.1 Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air domestik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air, budaya dan iklim setempat, dan sebagainya. Kebutuhan air non-domestik adalah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti:

a. Kebutuhan komersial dan industri

Adalah kebutuhan air bersih untuk kegiatan pertokoan, hotel, pasar, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, stasiun kereta api, stasiun bus dan lain lain.

b. Kebutuhan Fasilitas umum

Adalah kebutuhan air bersih untuk kegiatan tempat fasilitas umum, kebun, dan lain-lain.

c. Kebutuhan untuk Pemadaman kebakaran

Kebutuhan untuk Pemadaman kebakaran pada umumnya dibutuhkan di lokasi yang padat populasinya, dan banyak terdapat bangunan industrinya. Pedoman teknis air bersih dalam kriteria, standar perencanaan sistem air bersih pedesaan (2011), yakni : hidran umum (HU)/ Kran umum (KU) dengan kriteria 30 l/orang/hari, sambungan rumah (SR) dengan kriteria 90 l/orang/hari, lingkup pelayanan dengan kriteria 60-80%, perbandingan HU/KU-SR dengan kriteria 20:80-50:50, kebutuhan non domestik dengan kriteria 5%, kehilangan air akibat kebocoran 15 %, faktor puncak untuk harian maksimum dengan kriteria 1.5Qr, pelayanan HU/KU dengan kriteria 100 orang/unit, pelayanan SR dengan kriteria 10 orang/unit, jam operasi dengan kriteria 12 jam/hari, aliran maksimum HU/KU dengan kriteria 3000 l/Hari, aliran maksimum SR dengan kriteria 900 l/hari, periode perencanaan dengan kriteria 100 tahun.

2.6.2 Sistem Penyediaan Air Bersih

2.6.2.1 Unit Air Baku

Sumber air adalah bagian terpenting dari jaringan air minum. Sumur bor dan mata air biasanya lebih mudah dilindungi, karena air yang keluar dari tanah langsung ditampung oleh PMA (Penangkap Mata Air) sebagai jaringan air minum. PMA dari mata air biasanya berupa tampungan dan diberi pagar keliling untuk pengamanan. Kolam dengan ukuran secukupnya dibuat untuk menaikkan air sehingga dapat dengan mudah diambil atau dialirkan melalui pipa pengambilan (*intake*).

2.6.2.2 Unit Produksi

Instalasi Pengolahan Air (IPA) sering menjadi komponen yang sangat penting bagi jaringan air minum. Namun demikian Instalasi Pengolahan Air kadang-kadang hampir tidak dibutuhkan, jika air sumber sudah sangat dekat dengan persyaratan air minum baik dilihat dari sudut fisik, kimia maupun biologi. Air pegunungan yang belum terkena polusi banyak yang mempunyai standar air minum. Mungkin perlu adalah menambah klorin, untuk memastikan bahwa air yang diterima masyarakat masih dalam keadaan sehat walau sudah melalui pipa transmisi dan distribusi.

2.6.2.3 Unit Distribusi dan Pelayanan

Distribusi air bersih dapat dilakukan dengan cara yakni cara gravitasi dan pemompaan tergantung pada kondisi topografi daerah pengaliran. Sistem distribusi air dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian yaitu (Tri Joko, 2010) :

a. Sistem Gravitasi (*Gravity System*)

Cara gravitasi dapat digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai perbedaan cukup besar dengan elevasi daerah pelayanan, sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan. Cara ini dianggap cukup ekonomis, karena hanya memanfaatkan beda ketinggian lokasi.

b. Sistem Pemompaan (*Pumping System*)

Cara ini digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dari bak penampung ke pipa distribusi. Cara ini digunakan jika daerah pelayanan merupakan daerah yang datar, dan tidak ada daerah yang berbukit.

c. Sistem Kombinasi atau Gabungan (*Dual System*)

Pada sistem ini, pompa dihubungkan ke pipa distribusi dan juga ke bak penampung yang lebih tinggi. Ketika kebutuhan air sedikit, air disimpan atau mengalir ke bak penampung, dan ketika kebutuhan air bertambah aliran air di dalam sistem distribusi ini disuplai dari pompa dan bak penampung. Jadi, air disuplai dari dua sumber, pertama dari pemompaan dan kedua dari bak penampung itu sendiri dengan memanfaatkan ketinggian tempat (dengan gravitasi), sehingga sistem ini disebut dengan *dual system*.

Menurut petunjuk praktis perencanaan pembangunan sistem penyediaan air bersih pedesaan, 2006 yakni kriteria desain sistem penyediaan air bersih pedesaan adalah : SBABP dengan keterangan cakupan pelayanan 60-100% jumlah penduduk, jarak minimum penempatan minimal 200 meter, pelayanan 30-60 l/hari/jiwa, faktor kehilangan air 15% dari total kebutuhan air, faktor hari maksimum 1.1, faktor jam puncak 1.2, dan periode desain 5-10 tahun.

2.7 Kebijakan Pemerintah dalam RKPD & Arah Kebijakan Bidang Cipta Karya Sesuai Kebutuhan Anggaran

Desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Rencana kerja daerah dirumuskan ke dalam RKPD yang diadakan satu tahun sekali. Berdasarkan pelaksanaan Musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Hal ini kemudian diikuti oleh keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Araja Kebijakan pembangunan bidang cipta karya kabupaten Kampar periode 2014-2019 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, programnya yaitu :

- a) Program pembangunan infrastruktur jalan pedesaan
- b) Program pembangunan saluran drainase
- c) Program pengembangan kinerja pengelolaan air

2.8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Di Kabupaten Kampar

1. Pasal 11 Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi.
2. Pasal 15 Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

2.9 Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Di Kabupaten Kampar

1. Peraturan bupati kampar nomor 12 tahun 2017
 - a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan umum yang merupakan perlengkapan yang berguna untuk menunjang ketertiban, keamanan, keselamatan serta untuk menambah keindahan jalan.
 - b. Bahwa untuk memberi pedoman dalam hal umum di kabupaten kampar, perlu adanya peraturan yang mengatur tata cara umum di kabupaten Kampar

2.10 Kriteria Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Kampar

Adapun kriteria pembangunan infrastruktur daerah di kabupaten kampar dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Kriteria Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Kampar

No.	KEGIATAN	KRITERIA		DASAR
		KABUPATEN	DESA	
1.	Urusan Pembangunan Pada Pembangunan Dan Prasarana	Di Tepi Jalan Kabupaten Oleh SKPD Perhubungan	Di Tepi Jalan Desa Oleh Desa Setelah Mendapatkan Izin Dari SKPD Perhubungan.	KM Perhubungan No.65 Tahun 1993.
2.	Pengembangan Prasarana Jalan	1. Jalan Poros Kecamatan	1. Jalan Permukiman	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2. Jalan Poros Kabupaten	2. LPB Klas C	
		3. Jalan Poros Desa Ke Desa	3. Pembukaan Jalan Baru	
		4. Lapen	4. Jalan Usaha Tani	
3.	Drainase	Pembangunan Drainase Di Kawasan Permukiman Dan Strategis.	Pembangunan Drainase Di Kawasan Permukiman Desa	UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
		Pembangunan Drainase	Pembangunan Drainase Type S 4 /	

		sekunder dan tersier	berskala lokal yang tidak kompleks dan dilaksanakan	
4.	Air Bersih	Pengembangan System Penyediaan Air Minuman Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Pengelolaan Dan Pemeliharaan PAMSIMAS	UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air
		Pembangunan SPAM IKK (WTP Dan Jaringan)	Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Lokal	UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
				Peraturan Presiden No 72 Dan 73 Tahun 2005 Desa Dan Pemerintahan Kelurahan

Sumber : Data Dinas Binamarga dan Pengairan Pemerintah Kab. Kampar 2016

2.11 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan prasarana jaringan telah di lakukan oleh beberapa penelitian di masing-masing daerah yang berbeda. Dengan pembahasan pengembangan prasarana jaringan. Judul penelitian, pembahasan serta nama peneliti, terkait penelitian dapat di lihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Terkait Penelitian Yang Dilakukan

No	Nama	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Fajar Siddik Nasution (2010)	Studi Perencanaan Sistem prasarana Menggunakan analisis AHP	Menentukan kualitas penerangan di Jalan Wonosari Km 14– Km 17 berdasarkan standar yang digunakan dan bagaimana pengaruh prasarana yang telah digunakan.	Metode perhitungan prasarana menggunakan ahp	Perhitungan prasarana umum mempertimbangkan penyesuaiannya terhadap kebutuhan atau kondisi yang sesuai dengan konsep perencanaan
2.	Nurika (2011)	Perencanaan Kebutuhan Aset prasarana Umum Pada Ruas Di Kabupaten Subang	Kebutuhan fisik serta estimasi biaya pembangunan, pembongkaran, pemeliharaan, proyeksi biaya	Metode menentukan sistem-sistem kebutuhan Prasarana	Penempatan prasarana umum dan perhitungan jumlah anggaran memperhatikan integrasi jaringan transportasi setempat dengan jaringan regional yang sesuai standar pelayanan bagi masyarakat umum.
3.	Syafitri, Apriyan Dinata, Feby Asteriani (2015)	Kinerja Pelayanan Dan Operasional PDAM Tirta Kampar Terhadap Kebutuhan Air Bersih Kota Bangkinang, Provinsi Riau	Mengetahui sejauh mana pelayanan dan operasional PDAM Tirta Kampar yang mensuplai air bersih untuk Kabupaten Kampar	Menentukan kebutuhan air berih domestik dan non domestik, kebutuhan air domestik dan non domestik dari tahun ke tahun	Kualitas air yang diberikan PDAM kepada pelanggan cukup terjamin dari segi rasa, bau, warna sudah sesuai dengan standar depertemen kesehatan

4.	Rona muliana, Puji astuti, Akmal fadli (2018)	Kajian pelayanan di pusat-pusat Kabupaten Kampar	Menyusun rekomendasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar	Menggunakan analisis skalogram dan indeks sentralitas	Direkomendasikan struktur pusat-pusat pelayanan di Kab. Kampar terdiri dari 5 hierarki
5.	Mailendra, Puji Astuti, Mardianto Manan, Rona muliana (2018)	<i>The regional development based on leading sectors in kuantan singing regency, Riau Province</i>	<i>The result of the research is identified that there are 9 leading sectors of the 17 sectors</i>	<i>To the analysis method used location questions, dynamic location questions, shift share and typology sectors, and SWOT Analysis to formulate the strategy</i>	<i>Based on typology of the 9 sectors, 8 sectors are prospective sectors and 1 sector is not prospective (construction sector)</i>
6.	Muhammad Sofwan (2017)	Prioritas pembangunan infrastruktur pedesaan (studi kasus : Desa Semukut – Kabupaten Kep. Meranti	Menentukan skoring penilaian kualitas dan tingkat pelayanan dari masing-masing komponen infrastruktur	Metode keilmuan dengan pendekatan rasional dan empiris, serta kualitatif	Beberapa komponen menjadi prioritas dibagi 3 kategori, masing-masing menunjukkan tingkat kepentingan program / komponen yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam pembangunan infrastruktur.

Sumber : Hasil Analisis 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif atau penelitian terapan yang didalamnya mencakup penelitian survei, yaitu pengamatan di lapangan yang menghasilkan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dan beberapa referensi.

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Defenisi lain menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap angka tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik di sertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Dalam metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian secara deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Oleh itu penggunaan metode yang tepat sangat penting agar penelitian yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Arikunto (2008), mengatakan bahwa metode penelitian adalah langkah - langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Penelitian sama dengan tindakan menyelidiki, penyelidikan yang dilakukan dengan cara ilmiah yang sistematis untuk mendapatkan informasi ilmiah atau suatu temuan teknologi baru lainnya, yang dapat membuktikan kebenaran atau tidak benarnya hipotesis ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta – fakta dari gejala – gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan secara faktual artinya memberikan penjelasan peristiwa atau kejadian sekarang maupun menjelaskan peristiwa atau keadaan yang akan mendatang.

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya periode observasi yang perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Dalam observasi ini penulis melakukan pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan untuk dapat memperoleh data yang di butuhkan.

Ukuran penelitian penerangan jalan terbagi menjadi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran kualitatif yang mana melihat, mengamati dan menghitung prasarana jaringan di Wilayah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan hasil terumuskannya pengembangan prasarana jaringan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3.2 Tahap Penelitian

3.2.1 Tahap Persiapan

Langkah – langkah yang harus dilakukan pada tahap ini adalah :

- a. Menentukan wilayah penelitian, wilayah penelitian ditentukan dengan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan, serta menentukan lokasi yang akan menjadi objek penulisan skripsi, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kunjungan ke Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Penentuan kebutuhan data sekunder yang diperlukan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan keperluan penelitian seperti profil Kecamatan Kampar.
- c. Penentuan kebutuhan data primer yang diperlukan dilapangan disesuaikan dengan konsep dan tujuan studi.
- d. Menyusun teknik pengumpulan data primer dengan teknik observasi.

3.3 Jenis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristik dari data tersebut. Setelah dikelompokkan pada masing – masing jenisnya, maka data-data itu akan menjadi input bagi tahap analisis dan dapat ditampilkan dalam bentuk.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkomplikasi ataupun bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber ataupun dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai serana pendapatan informasi ataupun data. maka dapat di simpulkan bahwa data primer dapat di peroleh dari pegamatan lapangan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik dengan menyalin atau megutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder juga diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/dinas/instansi diantaranya gambaran umum wilayah lokasi penelitian.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan didalam Kecamatan Kampar, dengan mengambil lokasi desa-desa, yang mana terletak pada jalan lintas sumatera antara kota pekanbaru, dan kota bangkinang.

3.5 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Pengembangan prasarana jaringan ini dengan mengamati lokasi yang ingin di identifikasi dengan waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian mulai dari awal januari 2019 hingga saat ini.

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari tempat mana saja yang bisa mendapatkan data tersebut antara lain :

a. Narasumber

Yaitu orang yang dapat memberikan informasi terkait pada objek dan ruang lingkup penelitian kita. Dalam hal ini narasumber yang tepat adalah bapak kepala kecamatan kampar, aparatur masyarakat desa, dan warga sekitar serta yang terkait dalam penelitian ini

b. Pengamatan

Data dan informasi bisa kita dapatkan melalui pengamatan pada aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan persoalan penelitian. Dari pengamatan

secara langsung pada objek penelitian, penelitian dapat atau keadaan yang nyata dilapangan.

c. Lingkungan Sekitar

Informasi tentang objek penelitian juga dapat bersumber dari lingkungan Kecamatan Kampar sebagai objek penelitian. Pemahaman tentang lingkungan penelitian juga perlu untuk mempermudah penelitian langsung.

d. Dokumen

Dokumen dalam hal ini adalah bahan tertulis yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian ini. Dokumen ini berupa kejadian-kejadian yang sudah terjadi yang dapat menjadi referensi dalam penelitian.

Adapun tujuan dijadikan informan diatas adalah untuk mengetahui respon terhadap pengembangan prasarana kecamatan Kampar serta memperoleh data dan yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.7 Populasi dan Sampel

3.7.1 Populasi

Dalam memecahkan masalah, langkah yang penting adalah menentukan populasi menjadi sumber data dan sekaligus sebagai objek penelitian. Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif atau kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Usman dan Akbar, 2009). Adapun beberapa populasi yang diambil yakni aparaturnya pemerintahan, dan masyarakat Kecamatan Kampar.

3.7.2 Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu (Usman dan Akbar, 2009). Dalam penelitian ini ada 2 cara yang dilakukan dalam pengumpulan atau pengambilan data diantaranya observasi secara langsung ke wilayah penelitian, melalui wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Nonprobability sampling*, yaitu pengambilan sampel tidak secara acak (*Non random*). Pada *Nonprobability sampling* ini sampel dipilih karena pertimbangan-pertimbangan tidak acak, seperti kesesuaian sampel dengan kriteria-kriteria yang dirumuskan peneliti. Bagian teknik penelitian *Nonprobability sampling* untuk pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* (teknik sampel bertujuan), dimana teknik ini

digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

Alasan menggunakan teknik penelitian ini adalah seringkali banyak batasan yang menghalangi peneliti mengambil sampel secara *random*. Sehingga kalau menggunakan *random sampling*, akan menyulitkan peneliti. Dengan menggunakan *purposive sampling* diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

- a. Narasumber untuk memperoleh data

Tabel 3.1
Responden

No.	Informan	Pekerjaan / Profesi
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Bidang Cipta Karya Kab. Kampar
2.	Camat	Camat Kampar
3.	Aparat Desa	a. Kepala Desa b. Kepala Dusun c. Kepala Dusun d. Kepala Dusun e. Kepala Dusun f. Ketua RW g. Ketua RT
4.	Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kampar

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Adapun tujuan dijadikan informan diatas adalah untuk mengetahui respon terhadap pengembangan prasarana kecamatan Kampar serta memperoleh data dan yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini antaranya :

- a. Pengamatan Secara Langsung

Pengamatan secara langsung dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian yaitu kecamatan kampar .

- b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dan responden objek penelitian yang terdiri dari bapak kepala desa, aperatur desa, masyarakat sekitar jalan untuk memperoleh informasi yang relevan terhadap masalah yang di teliti disekitar kecamatan kampar tersebut.

Wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden kecil. (sutrisno dan sugiyono 2010) mengungkapkan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan interview sebagai berikut:

1. Bahwa responden adalah orang yang tau dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interprensi subjek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh peneliti ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah mengajukan pertanyaan kepada responden dan pertanyaan tersebut dapat di jawab sesuai dengan stuktur pertanyaan yang ada.

Sekelompok objek yang dijadikan penelitian ada hubungannya dengan masalah yang diteliti atas semua gejala yang ada di kawasan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh data dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Informan Dalam Melakukan Wawancara Stakeholder

No.	Stakeholder	Pekerjaan/Profesi
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Sub bidang Cipta Karya
2.	Dinas Perhubungan	Sub bidang perencanaan
3.	Camat	Camat Kampar
4.	Desa	Kepala Desa
5.	Masyarakat	Kecamatan Kampar

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Adapun tujuan dijadikan informan diatas adalah untuk mengetahui respon terhadap prasarana jaringan yang ada di Kecamatan Kampar serta memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.9 Tahap Analisis

Untuk memudahkan tahap analisis maka penelitian dilakukan dengan melaluitahap – tahap sebagai berikut :

1. Untuk Mengidentifikasi Kondisi Prasarana Desa Kecamatan Kampar Mengenai perumusan mendapatkan data dan hasil survei maka digunakan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata ataupun huruf dan

bukan dalam bentuk angka, tahapan analisis data kualitatif ini diperoleh melalui sebagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, observasi lapangan dan lain-lain. Analisis ini tidak dilakukan dengan menggunakan rumusan angka melainkan analisis dokumen dan kualitas.

2. Untuk Mengidentifikasi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah tentang perencanaan Prasarana Desa Kecamatan Kampar
Pengambilan untuk mendapatkan hasil ini didasarkan pada metode dengan analisis *stakeholder* mengenai pendapat dan data ataupun observasi dari mereka.

3. Untuk Merumuskan Strategi Pengembangan Prasarana Desa Kecamatan Kampar

Analisis *Taksonomic* merupakan instrument analisis, presentasi dan manajemen dapat membantu menganalisis situasi existing, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan, (Spradley, 1997 dalam Dyah 2015).

Langkah- langkah dalam penyusunan kerangka Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*):

- 1) Menetapkan Kekuatan (*Strength*) pada hasil analisa yang dijabarkan
- 2) Menjabarkan kegiatan atau aktivitas (*Activity*) yang diterapkan pada hasil analisa
- 3) Memasukkan dampak (*Threats*) yang akan didapatkan pada hasil analisa
- 4) Menjabarkan Permasalahan/ Kelemahan (*Weakness*) yang telah dianalisa pada penelitian tersebut.
- 5) Mendapatkan Asumsi Strategi (*SATW*) untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada proses.

Adapun langkah mendapatkan hasilnya diperoleh dari Matriks Taksonomi, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Analisis Taksonomi Matriks

Taksonomi Matriks							
Permasalahan / Kelemahan (W I)			Asumsi Strategi (SATW I)	Asumsi Strategi (SATW II)	Permasalahan / Kelemahan (W II)		
→					←		
Ancaman/ Threats (T)	Aktivitas Activity (A)	Kekuatan/ Strength (S)			Kekuatan/ Strength (S)	Aktivitas Activity (A)	Ancaman/ Threats (T)
↑	←	←			→	→	↑

Sumber : Spradley, 1997 dalam Dyah 2015

3.10 Metode Pengambilan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode observasi langsung. Metode observasi langsung diartikan sebagai pengamat, pengukuran dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Survei data primer Pengamatan pengukuran dan pencatatan yang dilakukan terhadap di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga penelitian berada. Survei data sekunder peneliti adalah sumber data yang dikumpulkan diantaranya pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengerjaan yang dapat membantu penyelesaian laporan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan maksud agar memperoleh input data yang selanjutnya akan digunakan dalam proses analisis. Proses pengumpulan data yang didapat diantaranya :

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Proses pencarian data primer ini dengan melakukan survei dilokasi studi kasus atau pengamatan langsung dilapangan, yang selanjutnya juga akan dilakukan wawancara langsung dengan beberapa teknik-teknik tertentu diantaranya sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi merupakan bagian dari kegiatan survei secara langsung dilapangan dan melihat secara langsung bagaimana proses interaksi antara sesama masyarakat di desa itu sendiri dan melihat kejadian-kejadian tertentu yang mampu mendukung pengukuran data dan mencatatnya.

a) Wawancara

Merupakan proses pengerjaan dengan cara wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada kepala kecamatan dan aperatur desa serta masyarakat di sekitar dengan tujuan guna mendapatkan data yang lebih *valid* dan menyempurnakan hasil pengerjaan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung, merupakan kebalikan dari data primer yang didapatkan secara langsung, data sekunder didapatkan melalui media perantara atau melalui instansi-instansi terkait yang memungkinkan memiliki data-data yang dicari Seperti BPS, Baik BPS Provinsi Atau Kabupaten, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya, Bappedda, PU dan instansi dalam kecamatan seperti kantor camat dan lain-lain, adapun teknik yang dilakukan dalam pengambilan data sekunder antara lain :

a) Studi Literatur

Studi literatur yaitu merupakan pengambilan data-data pendukung pengerjaan awal sebelum melakukan survei atau observasi dilapangan secara langsung, data-data studi literatur merupakan data yang berisi tentang sejarah dan hal-hal penting di kecamatan kampar guna pendalaman awal dan data tersebut didapatkan pada literatur-literatur yang ada, seperti buku-buku maupun pencarian di web-web terkait. Tujuan dari pencarian data literatur ini adalah guna untuk pendalaman awal studi kasus dan meletakkan dasar yang kuat dalam melakukan kajian permasalahan.

b) Instansi

Pengambilan data sekunder diinstansi merupakan pengambilan beberapa data yang di miliki secara lengkap di instansi-instansi terkait seperti pencarian data di BPS, dinas tata ruang dan cipta karya, bapperda, PU dan instansi terkait lainnya. Tujuan dari pengambilan data dari instansi-instansi ini adalah guna untuk melengkapi data yang telah ada sebelumnya.

3.11 Tahap Penentuan Variabel

Variabel merupakan indikator yang digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah dari suatu penelitian. Sebelum memasuki tabel variabel penelitian, ada beberapa teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, sehingga akan dipilah untuk menjelaskan rumusan masalah dari suatu penelitian yakni :

1. Kondisi Eksisting Prasarana

a. Keberadaan Jalan

Kebutuhan jalan merupakan penerapan untuk menghasilkan ketercapaian dalam rangka meningkatkan kualitas struktur jalan termasuk dalam ruang milik jalan (Rumija) PP No. 34 Tahun 2006 Tentang kelas jalan dan kebutuhan akan ruang milik jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan bebas hambatan (dalam Guha, 2008) :

- a) Kebutuhan jalan baru
- b) Pengaspalan jalan sedang
- c) Perbaikan jalan bebas hambatan
- d) Pemeliharaan jalan raya

b. Karakteristik Drainase

Dilakukan upaya penyusunan kriteria desain drainase kawasan permukiman kota berwawasan lingkungan, bahan-bahan utama penyusunan diambil dari Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase Permukiman Perkotaan Ramah Lingkungan. Sub Kegiatan Kriteria Desain Drainase Ramah Lingkungan Kawasan Permukiman (Sarbidi, dkk, 2013). Berdasarkan laporan sistem drainase (Sarbidi dan Edinur, 2013) diketahui bahwa drainase berwawasan lingkungan terdiri atas drainase lokal dan drainase utama, yaitu : a) Sistem penampungan dengan : kolam retensi, kolam detensi (*bouzem*), bendung pengendali banjir (Bendali) serta *polder* untuk pengendalian banjir. b) Sistem peresapan digunakan : sumur resapan air hujan dan lainnya. dan c) Sistem pemanfaatan air hujan dengan penampungan air hujan.

c. Karakteristik Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih dalam perencanaan dan pengembangannya terdapat unsur fungsional dalam sistem penyediaan air bersih oleh (Tri Joko, Unit Air Baku dalam sistem penyediaan air minum, 2015) diantaranya :

Sumber Air, Reservoir/ Prasedimentasi, Transmisi Air Bersih, Pompa / Pengolahan dan Jaringan Distribusi.

2. Upaya Kebijakan atau Peratutran

Desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Rencana kerja daerah dirumuskan ke dalam RKPD yang diadakan satu tahun sekali. Berdasarkan pelaksanaan Musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Hal ini kemudian diikuti oleh keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Arah Kebijakan pembangunan bidang cipta karya kabupaten Kampar periode 2014-2019 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, programnya yaitu :

- a) Program pembangunan infrastruktur jalan pedesaan
- b) Program pembangunan saluran drainase
- c) Program pengembangan kinerja pengelolaan air

3. Strategi Pengembangan

Menurut Spradley, 1997 dalam Dyah 2015, adapun langkah- langkah dalam penyusunan kerangka Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*):

- 1) Menetapkan Kekuatan (*Strength*) pada hasil analisa yang dijabarkan
- 2) Menjabarkan kegiatan atau aktivitas (*Activity*) yang diterapkan pada hasil analisa
- 3) Memasukkan dampak (*Threats*) yang akan didapatkan pada hasil analisa
- 4) Menjabarkan Permasalahan/ Kelemahan (*Weakness*) yang telah dianalisa pada penelitian tersebut.
- 5) Mendapatkan Asumsi Strategi (*SATW*) untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada proses.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel penentuan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4. Variabel Penelitian

No.	Sasaran	Variabel	Indikator
1.	Mengidentifikasi Kondisi Prasarana Desa Kecamatan Kampar	Penyusunan, Pengembangan Dan Program Pembangunan Prasarana Jaringan : Kondisi Prasarana Jalan, Drainase, Air Bersih	Keberadaan Jalan Karakteristik Drainase Karakteristik Penyediaan Air Bersih
2.	Menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perencanaan prasarana kecamatan Kampar	Adapun Upaya-Upaya Dari Berbagai Pihak Terkait Kebijakan atau peraturan	Kebijakan pemerintah dalam RKPD & Arah kebijakan bidang cipta karya sesuai kebutuhan anggaran
3.	Merumuskan strategi perencanaan pengembangan prasarana di desa kecamatan kampar	Strategi Pengembangan	Analisis Taksonomi

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Terdapat juga penjabaran dari variable penelitian ini yaitu desain penelitian dapat dilihat pengelompokkannya dari tinjauan strategi dalam menentukan pengembangan kawasan prasarana jaringan di Kecamatan Kampar sebagai berikut:

Tabel 3.5 Desain penelitian

No.	Sasaran	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Output
1.	Mengidentifikasi Kondisi Prasarana Desa Kecamatan Kampar	Penyusunan, Pengembangan Dan Program Pembagunan Prasarana Jaringan : Kondisi Prasarana Jalan, Drainase, Air Bersih	a. Keberadaan Jalan b. Karakteristik drainase c. Karakteristik penyediaan air bersih	Analisis Deskriptif Kualitatif dengan : 1. Survy 2. Observasi 3. Wawancara	Teridentifikasinya Kondisi Prasarana Desa kecamatan Kampar
2.	Menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perencanaan prasarana kecamatan Kampar	Adapun Upaya-Upaya Dari Berbagai Pihak Terkait Kebijakan atau peraturan	Kebijakan pemerintah dalam RKPD & Arah kebijakan bidang cipta karya sesuai kebutuhan anggaran	Analisis Deskriptif Kualitatif	Teranalisisnya Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Pada Prasarana Desa Kecamatan Kampar
3.	Merumuskan strategi perencanaan pengembangan prasarana di desa kecamatan kampar	Strategi pengembangan	Analisis Taksonomi	Pembobotan Hasil Kesesuaian Pengembangan Prasarana	Terumuskannya Strategi Pengembangan Prasarana Di Desa Kecamatan Kampar

Sumber : Analisis, 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2007 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi Ibukota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi Ibukota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya Ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan berdasarkan Permendagri No 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten / Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 13 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian

4.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batasbatas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu :

1. Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
2. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar terdapat di Kabupaten Kampar sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten kampar terdiri 21 kecamatan dengan rincian dan luasnya pada tabel dibawah ini. Tabel 4.1 Luas Wilayah Kampar Menurut Kecamatan.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan/Desa	
			Km2	(%)	Kelurahan	Desa
1.	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33	8,1	1	19
2.	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25	11,5		24
3.	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74	6,8	1	7
4.	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59	2,9		9
5.	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	597,97	5,3		11
6.	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,40	12,4	1	12
7.	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,00	6,0		6
8.	Kuok	Kuok	151,41	1,3		9
9.	Salo	Salo	207,83	1,8		6
10.	Tapung	Patapahan	1.365,97	12,1		25
11.	Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15	10,3		14
12.	Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,56	8,9		16
13.	Bangkinang Kota	Bangkinang	177,18	1,6	2	2
14.	Bangkinang	Muara Uwai	253,50	2,3	2	7
15.	Kampar	Air Tiris	136,28	1,3	1	17
16.	Kampar Timur	Kampar	173,08	1,5		9
17.	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	0,7		7
18.	Kampar Utara	Sawah	79,84	0,8		8
19.	Tambang	Sei. Pinang	371,94	3,3		17
20.	Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80	6,1		12
21.	Pehentian Raja	Pantai Raja	111,54	1,0		5
Jumlah			11.289,28	100,0	8	242

Sumber : Kabupaten Kampar dalam Angka 2018

4.1.3 Iklim

Secara umum kabupaten kampar wilayah studi beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 32°C-33°C. Rata – rata curah hujan tahunan cukup tinggi (>2000 mm) dengan jumlah hari hujan rata-rata tahunan antara 112-182 hari. Distribusi iklim secara spasial cukup baik, perbedaan iklim antar lokasi tidak begitu mencolok. Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 2.743 mm sampai dengan 4.130 mm.

Ketersediaan air pada umumnya cukup dari waktu ke waktu sehingga sangat mendukung bagi kegiatan dan pengembangan pertanian di wilayah kampar termasuk dapat mendukung ketersediaan air permukaan seperti sungai, embung atau bangunan penangkap air hujan.

4.1.4 Topografi & Klimatologi

Keadaan topografi tanah sebagian besar (80%) merupakan tanah datar dan 20% bergelombang sampai berbukit. Karena letak didaerah tropis, maka iklim yang berlaku didaerah ini adalah iklim tropis yang dipengaruhi angin laut, ketinggian dari laut adalah 93 M. Suhu udara berkisar 24°C s/d 35°C, jumlah hari hujan 185 hari pertahun dengan jumlah curah hujan 3,487 mm/tahun (kabupaten Kampar dalam angka, 2016).

4.1.5 Morfologi

Morfologi atau bentang alam suatu daerah merupakan perwujudan suatu daerah yang terciptanya dari bentuk muka bumi yang didasarkan pada peta topografi ataupun kenampakan lapangan. Berdasarkan itu serta ketinggian topografi, kemiringan lereng dan pola aliran yang ada maka morfologi kabupaten kampar dapat dibagi menjadi (3) satuan morfologi :

1. Satuan morfologi perbukitan gelombang tinggi
2. Satuan morfologi perbukitan gelombang rendah
3. Satuan morfologi dataran bergelombang

4.1.6 Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Pekanbaru (0806) tahun 1982 dan Solok (0805) edisi ke-2 tahun 1995 skala 1:250.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi), Kabupaten Kampar terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorphosis dan batuan terobosan yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah Kampar pada bagian barat kearah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorphosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen.

4.1.7 Hidrologi

Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau, dan rawa-rawa. Perairan di darat ini umumnya dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan perairan dekat pantai merupakan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan,

sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak dan Sungai Tapung) dimanfaatkan sebagai jalur perhubungan antara desa. Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu diantaranya : Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Mengalir dari punggung Bukit Barisan ke arah timur membelah wilayah kabupaten kampar dengan melalui beberapa kecamatan yang meliputi kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri serta Sungai Tapung yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi kecamatan tapung sampai ke sungai siak.

4.1.8 Keadaan Demografi

Dilihat dari segi sosial budaya, penduduk Kabupaten Kampar sangat heterogen sifatnya apabila ditinjau dari asal usul keturunan, sebagian adalah pendatang dari luar Kabupaten Kampar yaitu kurang lebih 35% dari suku melayu pendatang, 10% dari jawa, 40% penduduk asli dan 15% dari berbagai suku.

4.1.9 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan data penduduk tahun 2016 sebanyak 812.702 jiwa yang terdiri atas 417.085 jiwa penduduk laki-laki dan 395.617 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan data jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 2,48 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,55 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar 2010, 2015, dan 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010 (Jiwa)	2015 (Jiwa)	2016 (Jiwa)	2010 (%)	2015 (%)
1.	Kampar Kiri	26.304	29.987	30.676	16,62	2,30
2.	Kampar Kiri Hulu	10.541	11.876	12.100	14,79	1,89
3.	Kampar Kiri Hilir	10.112	11.462	11.702	15,72	2,09
4.	Kampar Kiri Tengah	23.677	26.953	20.218	16,39	2,24
5.	Gunung Sahilan	17.241	19.732	27.558	17,27	2,44
6.	XIII Koto Kampar	21.242	24.144	24.673	16,15	2,19
7.	Koto Kampar Hulu	16.682	18.939	19.346	15,97	2,15
8.	Kuok	22.188	25.186	25.726	15,95	2,14
9.	Salo	22.844	25.954	26.518	16,08	2,17
10.	Tapung	82.883	95.476	98.031	18,28	2,68
11.	Tapung Hulu	70.267	81.936	84.517	20,28	2,15
12.	Tapung Hilir	52.439	60.106	61.603	17,48	2,49
13.	Bangkinang Kota	35.006	39.773	40.639	16,09	2,18
14.	Bangkinang	29.151	33.043	33.735	15,73	2,09
15.	Kampar	44.631	50.555	51.601	15,61	2,07
16.	Kampar Timur	21.424	24.528	25.129	17,29	2,45
17.	Rumbio Jaya	15.198	17.192	17.540	15,41	2,02
18.	Kampar Utara	15.196	17.242	17.609	15,88	2,13
19.	Tambang	53.024	61.027	62.640	18,14	2,64
20.	Siak Hulu	86.658	100.253	103.099	18,97	2,84
21.	Pehentian Raja	15.470	17.637	18.042	16,63	2,30
Jumlah		692.179	793.005	812.702	17,41	2,48

Sumber : Kabupaten Kampar dalam Angka 2017

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2016 mencapai 72 jiwa/Km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 21 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 379 jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 9 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 persen dari tahun 2015.

Tabel 4.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2017

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1.	Kampar Kiri	915,33	30.676	34
2.	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	12.100	9
3.	Kampar Kiri Hilir	759,74	11.702	15
4.	Kampar Kiri Tengah	330,59	20.218	83
5.	Gunung Sahilan	597,97	27.558	34
6.	XIII Koto Kampar	732,40	24.673	34
7.	Koto Kampar Hulu	674,00	19.346	29
8.	Kuok	151,41	25.726	170
9.	Salo	207,83	26.518	128
10.	Tapung	1.365,97	98.031	72
11.	Tapung Hulu	1.169,15	84.517	72
12.	Tapung Hilir	1.013,56	61.603	61
13.	Bangkinang Kota	177,18	40.639	229
14.	Bangkinang	253,50	33.735	133
15.	Kampar	136,28	51.601	379
16.	Kampar Timur	173,08	25.129	145
17.	Rumbio Jaya	76,92	17.540	228
18.	Kampar Utara	79,84	17.609	221
19.	Tambang	371,94	62.640	168
20.	Siak Hulu	689,80	103.099	149
21.	Pehentian Raja	111,54	18.042	162
Jumlah		11.289,28	812.702	72

Sumber : Kabupaten Kampar dalam Angka 2018

4.1.10 Sosial Masyarakat

Dari segi sosial budaya, masyarakat kampar termasuk daerah dengan tingkat heterogenitas etnis yang tinggi. Selain penduduk asli (orang melayu riau), maka suku bangsa lain yang cukup dominan di Riau ialah Minangkabau, Jawa, Batak, dan Cina. Dengan tingkat migrasi penduduk cukup tinggi, namun soliditas masyarakat tampak kuat. Ada dua faktor yang mengikat masyarakat di wilayah studi menjadi relatif solid, yaitu kesamaan agama dan kekompakan diantara tokoh-tokoh masyarakat. Faktor kedua adalah adanya kesamaan pandangan diantara tokoh-tokoh masyarakat dalam merespon aktivitas pemerintahan sehari-hari. Ketiga pilar tokoh masyarakat itu ialah tokoh adat (lembaga adat), tokoh agama (MUI), dan tokoh cendekiawan (antara lain yang tergabung dalam forum Komunikasi dan Pemuka masyarakat Kampar.

Pembangunan dan pembinaan sumberdaya manusia sangat penting peranannya dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah studi sangat diperlukan guna mencapai

tujuan pelaksanaan pembangunan dengan baik. Potensi pembangunan Sumber Daya Manusia di wilayah studi ditinjau dari aspek kondisi dan karakteristik kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup besar.
2. Memiliki sifat kegotongroyongan yang tinggi.
3. Berdasarkan potensi ekonomi dapat memacu pertumbuhan angkatan kerja.

4.2 Gambaran Umum Wilayah Penelitian Prasarana Jaringan Kecamatan Kampar

4.2.1 Tentang Prasarana Kecamatan Kampar

Adanya prasarana jaringan di suatu wilayah kemudian menyebabkan perkembangan pada wilayah sekitar. Umumnya perkembangan wilayah yang di asumsikan memiliki prospek ekonomi yang merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan imigran masuk. Dengan demikian bertambahnya mobilitas penduduk suatu wilayah. Meningkatnya mobilitas penduduk akan mendorong masyarakat untuk berwawasan luas dan memiliki pola pikir yang maju. Selain itu terjadi peningkatan terhadap jaringan sosial masyarakat, dengan meningkatnya transportasi darat yang luas dan lancar, akan menciptakan terjalannya jaringan sosial semakin luas pula (Adisasmita, 2012)

Pengembangan prasarana jaringan yang dikembangkan di kecamatan Kampar tentu hal tersebut merupakan suatu wujud aktivitas perubahan lahan dengan peruntukan fasilitas publik. Adanya prasarana jaringan dapat meningkatkan kawasan permukiman, industri dan jasa, serta meningkatkan sosial ekonomi.

Kualitas prasarana di Kecamatan Kampar perlu ditingkatkan dari segi prasarana jalan, prasarana drainase, dan prasarana air bersih dengan upaya dikedepankannya strategi dari masyarakat dan pemerintah guna membenahi dan menambah penunjang dari prasarana di Kecamatan Kampar.

4.2.2 Geografis & Demografi

4.2.2.1 Batas Wilayah Desa

Secara Geografis kecamatan kampar yang memiliki luas $\pm 14365,68 \text{ KM}^2$ dimana 60 % berupa daratan yang berpotografi berbukit-bukit yang dijadikan masyarakat sebagian besar untuk perkebunan karet, 30 % daratan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian serta 10% rawa yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perikanan (kolam ikan). Sama dengan

Kecamatan lainnya yang ada di Indonesia, kecamatan Kampar juga mempunyai dua iklim yakni kemarau dan hujan yang berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian masyarakat.

Adapun batas-batas Kecamatan Kampar secara administrasi Desa adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara Berbatasan dengan kec. XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Salo dan Kec. Bangkinang
- b) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Kampar Kiri Hulu
- d) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sahilan

4.2.2.2 Luas Wilayah Kecamatan

Luas wilayah Kecamatan Kampar ini dibagi dalam beberapa desa. Adapun jumlahnya bisa dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Luas Wilayah Kecamatan

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Batu Belah	3598,50
2.	Tanjung Berulak	2258,70
3.	Air Tiris	556,00
4.	Ranah	189,08
5.	Penyasawan	1950,56
6.	Rumbio	1638,00
7.	Padang Mutung	507,12
8.	Simpang Kubu	775,00
9.	Tanjung Rambutan	665,00
10.	Pulau Jambu	91,60
11.	Limau Manis	208,80
12.	Naumbai	208,50
13.	Ranah Singkuang	343,85
14.	Pulau Tinggi	300,37
15.	Koto Tibun	507,12
16.	Bukit Ranah	69,40
17.	Ranah Baru	45,44
18.	Pulau Sarak	452,53
KAMPAR		14365,68

Sumber : Profil Kec.Kampar dan BPS dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah di Kecamatan Kampar terbagi atas 18 desa dengan jumlah luas wilayahnya masing-masing, dan jumlah keseluruhan hektarnya yakni 14365,68 Ha.

4.2.2.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Kampar berdasarkan hasil proyeksi dan data dari pemerintahan desa. Pada data kependudukan Kecamatan Kampar dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa/Kelurahan Pulau Sarak dengan jumlah 1039 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling banyak adalah di Desa/Kelurahan Air Tiris yakni 6405 Jiwa.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kampar Tahun 2019

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Batu Belah	2565	2493	5058
2.	Tanjung Berulak	1121	1120	2241
3.	Air Tiris	3225	3180	6405
4.	Ranah	1744	1717	3461
5.	Penyasawan	2760	2668	5428
6.	Rumbio	1689	1643	3332
7.	Padang Mutung	1471	1367	2838
8.	Simpang Kubu	1286	1222	5208
9.	Tanjung Rambutan	1209	1153	3262
10.	Pulau Jambu	794	762	1556
11.	Limau Manis	1089	1079	2168
12.	Naumbai	1057	966	2023
13.	Ranah Singkuang	593	552	1145
14.	Pulau Tinggi	891	865	1756
15.	Koto Tibun	1073	1050	2123
16.	Bukit Ranah	1032	1056	2088
17.	Ranah Baru	563	555	1118
18.	Pulau Sarak	515	524	1039
JUMLAH		24677	23972	48649

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2019

Berdasarkan laporan kependudukan dari kecamatan tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 48.649 Jiwa, terdiri dari 24.677 Jiwa laki-laki dan 23.972 Jiwa Perempuan.

4.2.3 Keadaan Sosial

a. Lembaga Pendidikan

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Kampar dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi SD, SMP, SMA/SMK, dan Madrasah baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Tabel 4.6 Jumlah Pendidikan Kecamatan Kampar

No.	Desa/Kelurahan	SD	SMP	SMA/SMK	MADRASAH
1.	Batu Belah	4	1	0	2
2.	Tanjung Berulak	1	0	0	2
3.	Air Tiris	3	1	1	5
4.	Ranah	1	0	0	0
5.	Penyasawan	3	0	0	1
6.	Rumbio	1	0	0	3
7.	Padang Mutung	3	1	1	2
8.	Simpang Kubu	2	0	0	2
9.	Tanjung Rambutan	2	0	0	0
10.	Pulau Jambu	1	0	0	0
11.	Limau Manis	2	1	0	0
12.	Naumbai	1	0	0	2
13.	Ranah Singkuang	1	0	0	0
14.	Pulau Tinggi	1	0	0	0
15.	Koto Tibun	2	0	1	3
16.	Bukit Ranah	2	0	0	1
17.	Ranah Baru	0	0	0	0
18.	Pulau Sarak	1	0	0	0
	JUMLAH	31	4	3	23

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah di Kecamatan Kampar sebanyak 31 unit SD, 4 unit SMP, 3 unit SMA serta 23 unit Madrasah.

b. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kesehatan

No.	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1.	Batu Belah	1	0	0	0	0	0
2.	Tanjung Berulak	0	1	0	0	0	2
3.	Air Tiris	0	0	0	1	0	2
4.	Ranah	0	0	0	0	0	0
5.	Penyasawan	0	0	0	0	1	1
6.	Rumbio	0	0	0	0	1	0
7.	Padang Mutung	0	0	1	0	1	0
8.	Simpang Kubu	0	0	0	0	0	0
9.	Tanjung Rambutan	0	0	0	0	0	0
10.	Pulau Jambu	0	0	0	0	1	0
11.	Limau Manis	0	0	0	0	1	0
12.	Naumbai	0	0	0	0	0	0
13.	Ranah Singkuang	0	0	0	0	1	0

14.	Pulau Tinggi	0	0	0	0	0	0
15.	Koto Tibun	0	0	0	0	1	0
16.	Bukit Ranah	0	0	0	0	0	0
17.	Ranah Baru	0	0	0	0	0	0
18.	Pulau Sarak	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	1	1	1	7	5

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kampar adalah 1 unit rumah sakit, 1 unit RS bersalin, 1 unit poliklinik, 1 unit puskesmas, 7 unit puskesmas pembantu dan 5 unit apotek.

c. Pemenuhan Air Bersih

Kecamatan Kampar membutuhkan dan membuat sistem air bersih dengan berbagai kategori penggunaannya yaitu sumur, air sungai, air PAH, sumur hidran, dan POMP. Dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini dengan jumlah KK yang ada.

Tabel 4.8 Pemenuhan Air Bersih

No.	Kategori	Jumlah KK
1.	Pengguna Sumur Galian	8 KK
2.	Pengguna Air PAH	15 KK
3.	Pengguna Sumur POMP	590 KK
4.	Pengguna Sumur Hidran Umum	0 KK
5.	Pengguna Air Sungai	21 KK

Sumber : Profil Kec.Kampar, 2019

d. Keagamaan

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas agama islam yang terdapat di Kecamatan Kampar. Dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9 Keagamaan Kecamatan Kampar

No.	Kategori	Jumlah
1.	Islam	48.600
2.	Khatolik	0
3.	Kristen	49
4.	Hindu	0
5.	Budha	0

Sumber : Profil Kec. Kampar, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan agama islam yang mendominasi Kecamatan Kampar dengan jumlah 48.600 Jiwa dan sebagian beragama kristen dengan jumlah 49 Jiwa.

4.2.4 Struktur Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian penduduk Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Kategori	Jumlah
1.	Petani	8653 Orang
2.	Pedagang	3865 Orang
3.	PNS	96 Orang
4.	Tukang	98 Orang
5.	Guru	87 Orang
6.	Bidan /Perawat	72 Orang
7.	TNI /Polri	12 Orang
8.	Pensiunan	121 Orang
9.	Industri Pengolahan	176 Orang
10.	Listrik	8 Orang
11.	Angkutan	543 Orang
12.	Bank	6 Orang

Sumber : Profil Kec. Kampar, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas petani memang menjadi mata pencaharian yang paling besar di Kecamatan Kampar dengan jumlah 8653 orang.

4.2.5 Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tidak terkecuali pemerintahan desa terutama dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

a. Lembaga Pemerintahan

Adapun Lembaga Pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Kampar adalah Sebagai Berikut :

Tabel 4.11 Nama Pejabat Struktur Pemerintahan Kecamatan Kampar Menurut Jabatan Tahun 2019

No.	Jabatan	Nama
1.	Camat	Iskandar
2.	Sekretaris Camat	Ali Sostro Amijoyo
3.	Kasi Pemerintahan	Darmansyah
4.	Kasi PMD	Idrus, S.Sos
5.	Kasi Trantib	M. Nasir
6.	Kasi Kesosbud	Sirih
7.	Pemegang Kas	H. Idris

Sumber : Profil Kec.Kampar,2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pejabat struktur pemerintahan kecamatan Kampar terbagi beberapa diantaranya camat, sekretaris camat, kasi pemerintahan, kasi PMD, Kasi trantib, kasi kesosbud, dan pemegang kas. Ini membuktikan bahwa struktur di kecamatan Kampar terorganisir.

Selanjutnya struktur nama kepala desa/lurah menurut kecamatan Kampar dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.12 Nama Kepala Desa/Lurah Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Kampar Tahun 2019

No.	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/lurah
1.	Batu Belah	M. Zahril
2.	Tanjung Berulak	Adrian. ST
3.	Air Tiris	Wira Sastra SSTP
4.	Ranah	Doni Ariyanto
5.	Penyasawan	Sumarlis
6.	Rumbio	Andi Saputra
7.	Padang Mutung	Syaiful Nursaid
8.	Simpang Kubu	Erisman
9.	Tanjung Rambutan	Dedi Wahyudi
10.	Pulau Jambu	Muhammad Isyah
11.	Limau Manis	Abdul Manaf
12.	Naumbai	H. Mukarromi
13.	Ranah Singkuang	Kamaruddin
14.	Pulau Tinggi	Muhammad Yasir
15.	Koto Tibun	Hasbi
16.	Bukit Ranah	Pirdaus
17.	Ranah Baru	Anasril
18.	Pulau Sarak	Erwin

Sumber : Profil Kec.Kampar,2019

b. Lembaga Kemasyarakatan

Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di Kecamatan Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

No	Kategori	Jumlah
1.	LPM	10 Kelompok
2.	PKK	8 Kelompok
3.	Posyandu	37 Kelompok
4.	Pengajian	40 Kelompok
5.	Arisan	30 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	30 Kelompok
7.	Kelompok Tani	30 Kelompok

8.	Gapoktan	26 Kelompok
9.	Karang Taruna	15 Kelompok
10.	Pokdarwis	10 Kelompok
11.	Ormas / LSM	17 Kelompok

Sumber : Profil Kec. Kampar, 2019

Data diatas menunjukkan terhadap adanya kelompok-kelompok aktif dalam berbagai kategori lembaga yang mana berguna untuk kepentingannya masing-masing seperti lpm, pkk, posyandu, simpan pinjam, pokdarwis dan sebagainya.

c. Pembagian Wilayah

Dalam pembagian wilayah di Kecamatan Kampar, terbagi berdasarkan Dusun, RT, dan RW. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 16 dibawah ini :

Tabel 4.14 Pembagian Wilayah

No.	Desa/Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Batu Belah	5	17	36
2.	Tanjung Berulak	4	9	18
3.	Air Tiris	-	7	36
4.	Ranah	4	8	16
5.	Penyasawan	4	13	30
6.	Rumbio	8	15	30
7.	Padang Mutung	6	12	24
8.	Simpang Kubu	3	8	12
9.	Tanjung Rambutan	4	6	16
10.	Pulau Jambu	4	8	16
11.	Limau Manis	3	6	12
12.	Naumbai	3	6	12
13.	Ranah Singkuang	3	6	12
14.	Pulau Tinggi	4	8	16
15.	Koto Tibun	4	8	16
16.	Bukit Ranah	4	8	16
17.	Ranah Baru	4	4	11
18.	Pulau Sarak	2	4	18
	JUMLAH	69	152	347

Sumber : Profil Kec. Kampar, 2019

Data diatas menunjukkan bahwa kecamatan Kampar mempunyai kategori dari pengelompokkan pembagian wilayah diantaranya Dusun berjumlah 69, RW berjumlah 152 dan 347 untuk RT.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Kondisi Prasarana Jaringan

Kondisi ini melihat keadaan sekitar kecamatan berhubungan dengan prasarana yang dibahas. Kecamatan Kampar merupakan kecamatan yang cukup besar berada di kabupaten Kampar, dengan begitu pola struktur prasarana akan lebih dilihat dan ditinjau kedepannya.

5.1.1 Kondisi Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan yang berada antar desa dengan desa maupun desa dengan kota yang merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat yang berada di Kecamatan kampar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi jalan di Kecamatan Kampar membutuhkan penanganan khusus, masih banyak kategori tanah dan berlubang sehingga diperlukan realisasi oleh pihak terkait.

Jalan di Kecamatan Kampar merupakan prasarana yang harus mendapatkan perhatian. Kelayakan fisik jalan merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan jaringan jalan. Tingkat kelayakan fisik jalan menurut penduduk Kecamatan Kampar dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 5.1 Tingkat Kelayakan Jalan

No.	Tingkat Kelayakan Fisik Jalan	Persentase
1.	Layak	65 %
2.	Tidak Layak	15 %
3.	Sangat Tidak Layak	20 %
	Jumlah	100 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kampar, 2019



Gambar 5.1 Kelayakan Jalan
 Sumber : Dinas PU Kab.Kampar, 2019

Kebutuhan akan infrastruktur jalan di kecamatan Kampar dapat diketahui dari tingkat kebutuhan penduduk yang digambarkan dalam tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 5.2 Tingkat Kebutuhan Jalan

No.	Tingkat Kebutuhan Jalan	Persentase
1.	Butuh	78 %
2.	Sangat Butuh	12 %
3.	Tidak Butuh	10 %
Jumlah		100 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kampar, 2019



Gambar 5.2 Tingkat Kebutuhan Jalan
 Sumber : Dinas PU Kab.Kampar, 2019

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 zona yaitu zona A, B, C, dan D diantaranya meliputi pedesaan yaitu:

- a) Zona A meliputi Desa Penyesawan, Pulau Sarak, Koto Tibun, dan Pulau Tinggi
- b) Zona B meliputi Desa Air tiris, Bukit Ranah, Rumbio, dan Padang Mutung
- c) Zona C meliputi terdapat Desa Tanjung Rambutan, Pulau Jambu, Limau Manis, dan Ranah Baru.
- d) Zona D meliputi terdapat Desa Ranah Singkuang, Batu Belah, Simpang Kubu, Ranah, dan Tanjung Berulak. Maksud dari pembagian zona ialah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian sehingga dapat dikaji lebih spesifik dan jelas.

Kerusakan jalan yang ada di kecamatan Kampar disebabkan oleh beberapa hal seperti, material jalan yang kurang baik dan tidak tersedia saluran drainase di kanan kiri jalan sehingga menimbulkan genangan dan merusak fisik jalan. Kerusakan jalan tersebut membutuhkan perbaikan dan penanganan oleh instansi terkait ataupun kepedulian penduduk yang ada disekitar daerah jalan rusak di wilayah kecamatan Kampar. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan akan jaringan jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.3 Hasil Kebutuhan Jaringan Jalan di Kecamatan Kampar

Zona	Panjang Jalan (M)				Jumlah
	Pembuatan Jalan Baru	Pengaspalan /Paving	Perbaikan	Pemeliharaan	
A	1.858	2776	22.055	9.689	36.378
B	493	620	6.553	3.354	11.020
C	128	95	6.538	5.665	12.426
D	391	221	7.857	10.685	19.154
Jumlah	2.870	3.712	43.003	29.393	78.978

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kampar, 2019

Data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait prasarana jalan diketahui kebutuhan jalan di kecamatan Kampar sebagian besar membutuhkan pembuatan jalan baru sepanjang 2.870 meter, pengaspalan/paving membutuhkan 3.712 meter, perbaikan jalan hingga mencapai 43.003 meter serta membutuhkan pemeliharaan jalan 29,393 meter.

Data diatas menunjukkan panjang jalan yang bermasalah dan membutuhkan penanganan, dengan demikian analisis tentang kebutuhan jalan ini dimasukkan kedalam pengelompokkan zona yang sudah dibagi sehingga lebih memudahkan untuk mengetahui permasalahan terbesar yakni :

Tabel 5.4 Hasil Analisa dan Pengelompokkan Zona Pembuatan Jalan Baru

No.	Infrastruktur Jalan 4 Zona	Daerah Pembuatan Jalan Baru	Panjang Jalan (M)	Jumlah
1.	Zona A	Desa Koto Tibun	635	1.858 m
		Desa Pulau Sarak	582	
		Desa Penyesawan	641	
2.	Zona B	Desa Bukit Ranah	250	493 m
		Desa Air Tiris	243	
3.	Zona C	Desa Limau Manis	128	128 m
4.	Zona D	Desa Ranah	391	391 m
Jumlah			2.870	2.870 m

Sumber : Profil Desa dan Analisa, 2019

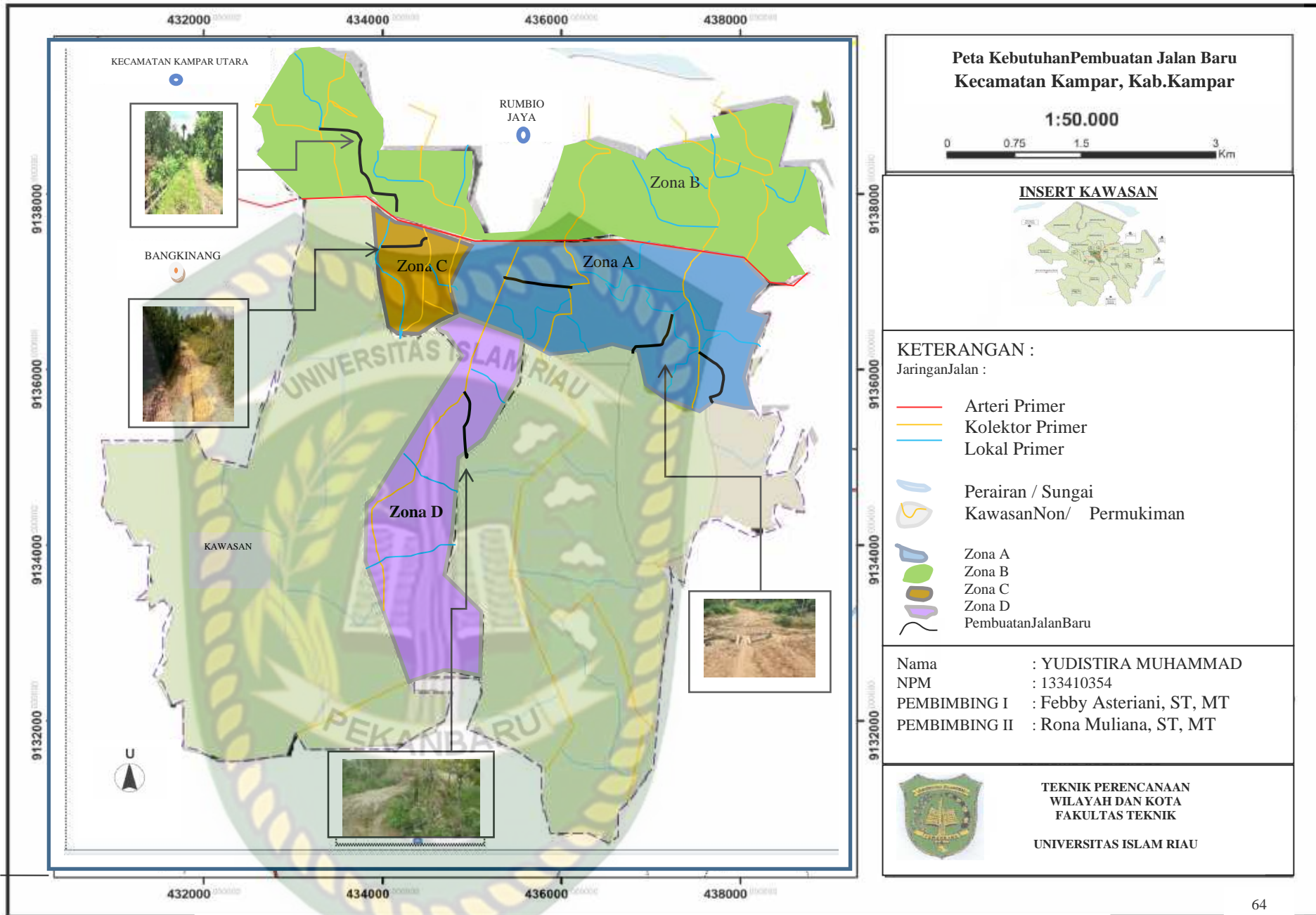
Data diatas menunjukkan bahwa pengelompokkan jalan di beberapa desa yang membutuhkan pembuatan jalan baru dengan panjang jalan berjumlah 2.870 m. untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 5.3 Pembuatan Jalan Baru beberapa kelurahan
Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Berikut merupakan gambaran dari kebutuhan jaringan jalan yaitu Kebutuhan pembuatan jalan baru dapat dilihat pada peta sebagai berikut :





GAMBAR 5.4 PETA KEBUTUHAN PEMBUATAN JALAN BARU KECAMATAN KAMPAR

Kebutuhan pembuatan jalan baru dapat berdampak baik bagi masyarakat kecamatan Kampar, umumnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani merasa sangat terbantu dikarenakan ketika jalan baru terealisasi maka penduduk tak perlu lagi berjalan kaki untuk memikul hasil pertanian yang diperoleh dari perkebunan, melainkan petani dapat langsung menggunakan moda transportasi.

Selanjutnya pengelompokkan daerah yang dominan untuk kebutuhan pengaspalan / *paving* berdasarkan zona, yakni dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5 Hasil Analisa dan Pengelompokkan Zona Pengaspalan / *Paving*

No.	Infrastruktur Jalan 4 Zona	Daerah Pengaspalan / <i>Paving</i>	Panjang Jalan (M)	Jumlah
1.	Zona A	Desa Koto Tibun	1.328	2.776 m
		Desa Pulau Sarak	1.448	
2.	Zona B	Desa Rumbio	620	620 m
3.	Zona C	Desa Tj. Rambutan	95	95 m
4.	Zona D	Desa Tj. Berulak	221	221 m
Jumlah			3.712	3.712 m

Sumber : *Profil Desa dan Analisa, 2019*

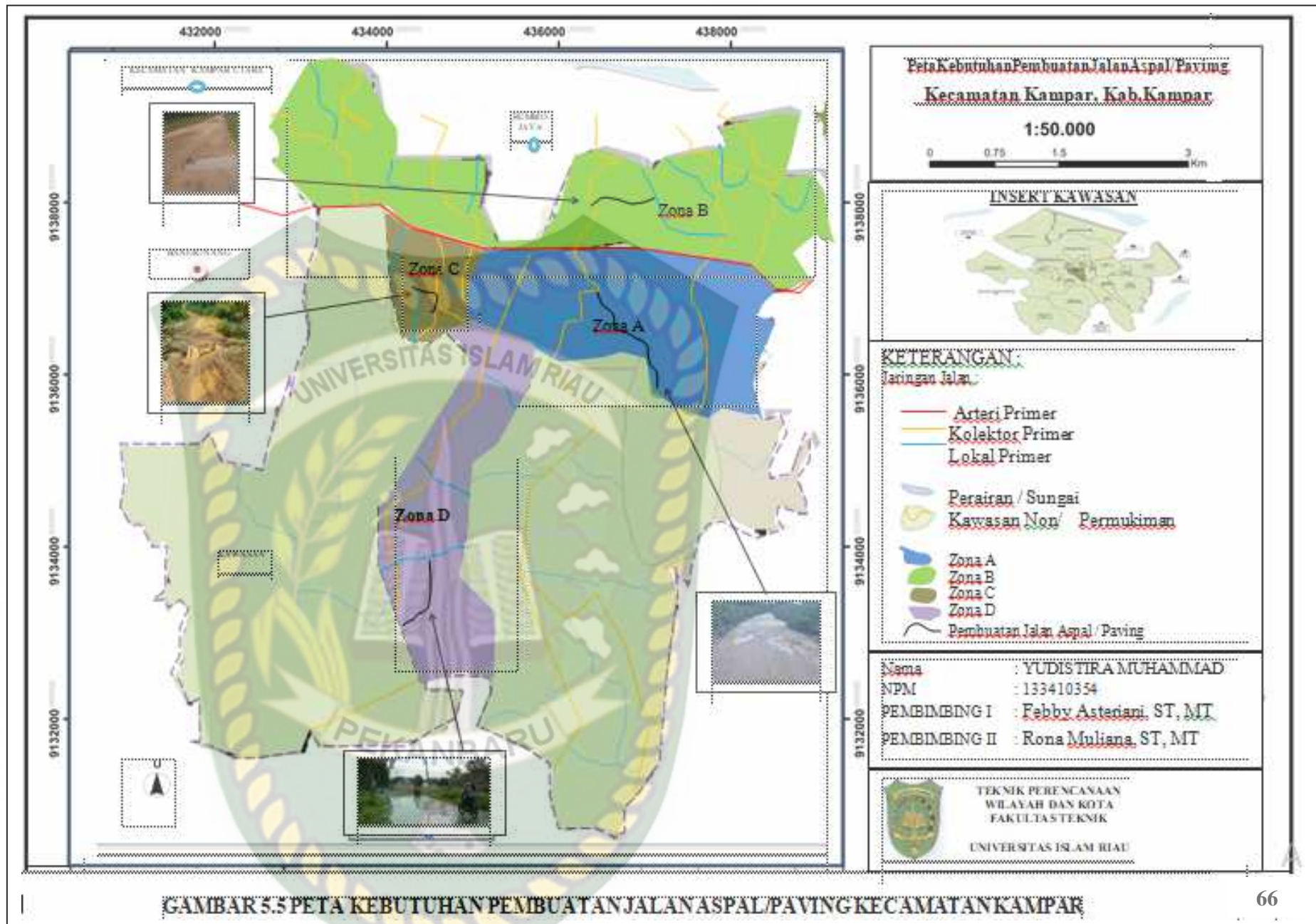
Data diatas menunjukkan bahwa pengelompokkan jalan di beberapa desa yang membutuhkan pengaspalan / *paving* dengan panjang jalan berjumlah 3.712 m. untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 5.5 Pengaspalan/*paving* beberapa kelurahan

Sumber : *Hasil Dokumentasi, 2019*

Berikut merupakan gambaran dari kebutuhan jaringan jalan yaitu Kebutuhan pengaspalan/*paving* dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



Hasil survei dan wawancara langsung kepada masyarakat, mereka menyampaikan jalan adalah satu-satunya akses penghubung dan semakin lama kondisi fisik jalan semakin rusak dan tidak layak digunakan, hal tersebut sangat berpengaruh dan mengganggu pergerakan pengguna jalan.

Selanjutnya pengelompokkan daerah yang dominan untuk kebutuhan perbaikan jalan berdasarkan zona, yakni dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6 Hasil Analisa dan Pengelompokkan Zona Perbaikan Jalan

No.	Infrastruktur Jalan 4 Zona	Daerah Perbaikan Jalan	Panjang Jalan (M)	Jumlah
1.	Zona A	Desa Koto Tibun	9.968	22.055 m
		Desa Pulau Sarak	12.087	
2.	Zona B	Desa Rumbio	6.553	6.553 m
3.	Zona C	Desa Tj. Rambutan	6.538	6.538 m
4.	Zona D	Desa Ranah	7.857	7.857 m
		Singkawang		
Jumlah			43.003	43.003 m

Sumber : Profil Desa dan Analisa, 2019

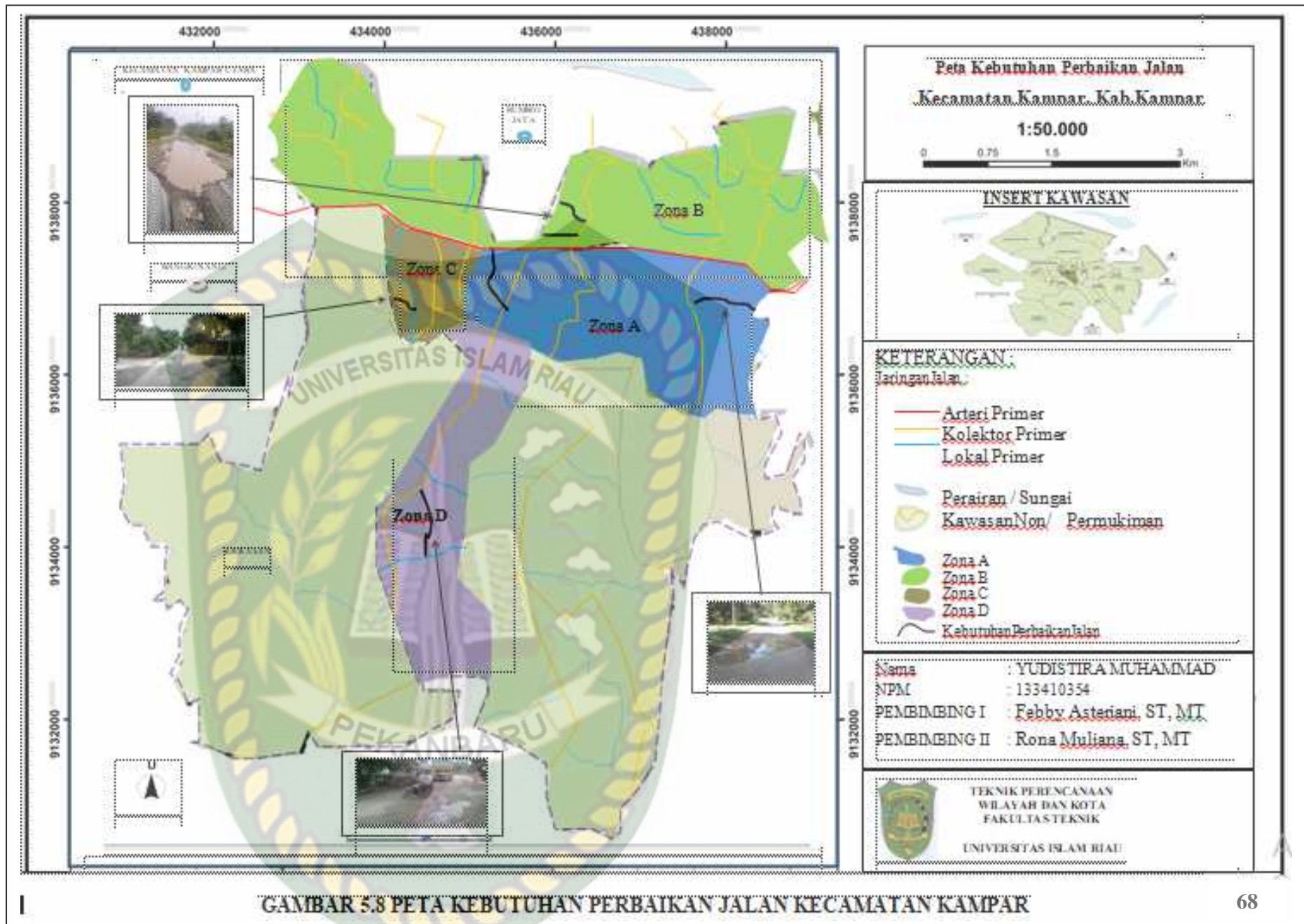
Data diatas menunjukkan bahwa pengelompokkan jalan di beberapa desa yang membutuhkan perbaikan dengan panjang jalan berjumlah 43.003 m. untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 5.7 Perbaikan jalan di beberapa kelurahan

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Berikut merupakan gambaran dari kebutuhan jaringan jalan yaitu Kebutuhan perbaikan jalan dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



GAMBAR 5.8 PETA KEBUTUHAN PERBAIKAN JALAN KECAMATAN KAMPAR

Sebagian jalan di kecamatan Kampar membutuhkan perbaikan, banyak disebabkan oleh saluran drainase dan pembongkaran jalan kepentingan telekomunikasi dan air bersih.

Selanjutnya pengelompokkan daerah yang dominan untuk kebutuhan pemeliharaan jalan berdasarkan zona, yakni dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7 Hasil Analisa dan Pengelompokkan Zona Pemeliharaan Jalan

No	Infrastruktur Jalan 4 Zona	Daerah Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan (M)	Jumlah
1.	Zona A	Desa Pulau Sarak	5.322	9.689 m
		Desa Penyesawan	4.367	
2.	Zona B	Desa Padang Mutung	2.406	3354 m
		Desa Rumbio	948	
3.	Zona C	Desa Limau Manis	2.703	5.665 m
		Desa Tj. Rambutan	2.962	
4.	Zona D	Desa Ranah Singkawang	10.685	10.685 m
Jumlah			29.393	29.393 m

Sumber : Profil Desa dan Analisa, 2019

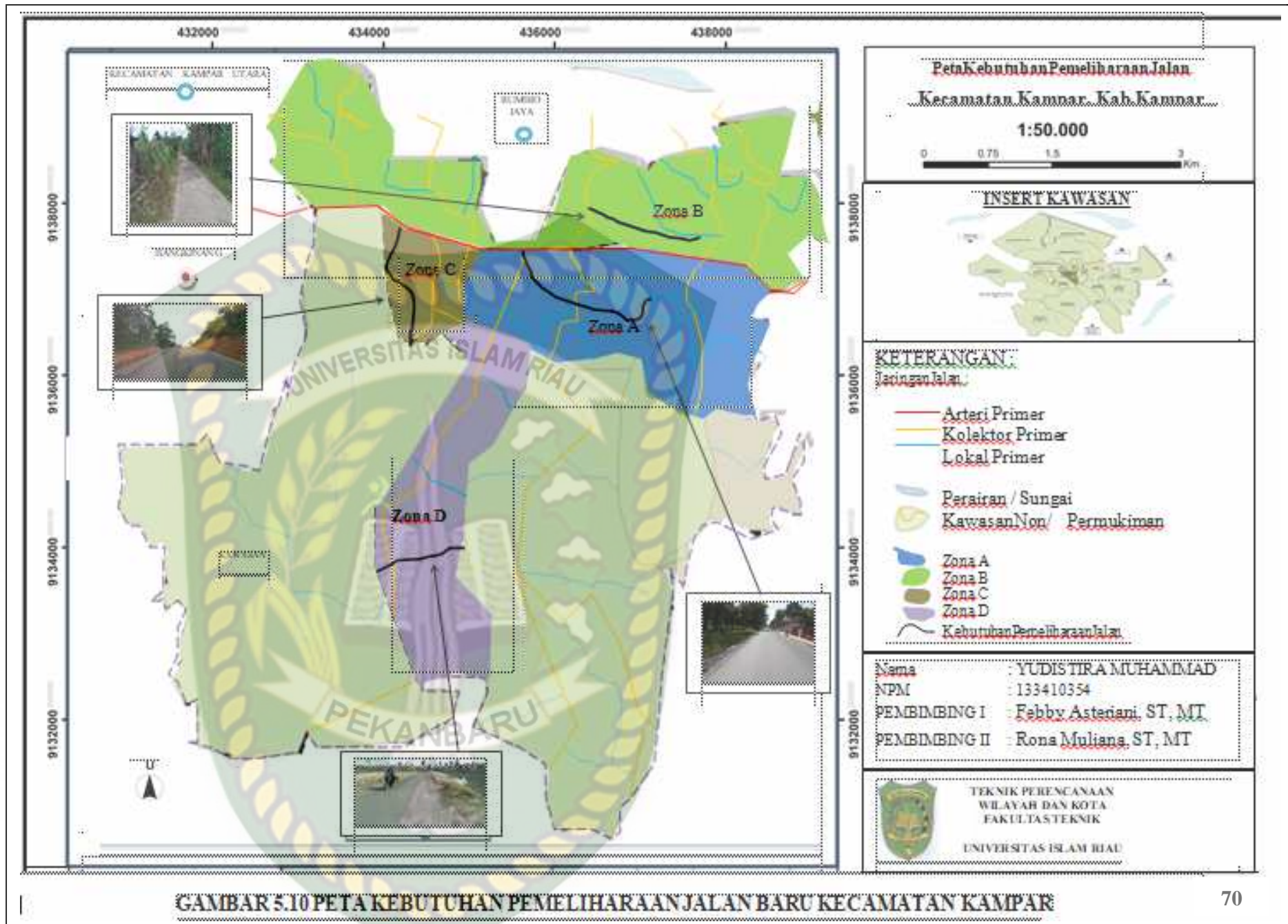
Data diatas menunjukkan bahwa pengelompokkan jalan di beberapa desa yang membutuhkan pemeliharaan jalan dengan panjang jalan berjumlah 29.393 m. untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 5.9 Pemeliharaan jalan di beberapa kelurahan

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Berikut merupakan gambaran dari kebutuhan jaringan jalan yaitu Kebutuhan pemeliharaan jalan dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



Dari kesimpulan diatas maka pengelompokkan yang paling dominan tertinggi untuk **pembuatan jalan baru** terdapat pada **Desa Penyesawan dengan panjang 641 meter (Zona A)**, untuk **pengaspalan/paving** terdapat pada **Desa Pulau Sarak dengan 1.448 meter (Zona A)**, untuk **perbaikan jalan** terdapat pada **Desa Penyesawan dengan panjang 12.087 meter (Zona A)**, dan untuk **pemeliharaan jalan** terdapat pada **Desa Ranah Singkawang dengan panjang 10.685 meter (Zona D)**.

Kesimpulan yang terdapat dari semua analisis jalan maka yang paling terbesar/ dominan bermasalah sehingga dibutuhkan realisasi yakni terdapat pada **Kebutuhan Perbaikan Jalan** dengan panjang keseluruhan **43.003 m**.

Dari hasil wawancara menunjukkan tentang pendapat dari pemerintah, aparat desa, dan masyarakat yang menjadi tolak ukur pengembangan prasarana jaringan sehingga memudahkan untuk membuat konsep dan realisasi dari perkembangan ini. Adapun hasil responden terhadap kondisi jalan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5.8 Hasil Wawancara Responden Terhadap Jalan

No.	Nama	Pertanyaan	Wawancara
1.	Yurisdian (Aparat Pemerintah) Jabatan : Sub Bidang Perencanaan Dinas PU	Bagaimana kondisi jalan di kecamatan kampar saat ini ? Apakah harus ada perbaikan & perubahan struktur jalan ?	Kondisi jalan di daerah ini membutuhkan penanganan khusus terutama saat hujan
2.	Darmansyah (Apara Desa) Jabatan : Kasi Pemerintahan Camat		Jalan penghubung desa-desa masih dikategorikan tanah dan dibutuhkan realisasi aspal
3.	Budi "Masyarakat" Jabatan : Pedagang		Kondisi jalan secara keseluruhan membutuhkan strategi untuk mengatasi lubang dan kecelakaan

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Kesimpulan sasaran kondisi infrastruktur jalan dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Kesimpulan Tiap Sub Sasaran

Data Sekunder	Observasi	Wawancara
Data dari Dinas PU Kab.Kampar, 2019 yakni tingkat kelayakan berkisar 65% layak, Tingkat Kebutuhan jalan 78 %, perbaikan jalan 43.003 m, dan pemeliharaan jalan 29.393 m.	Proses interaksi antara pihak terkait dengan masyarakat tentang prasarana ini sebagian besar sudah berjalan dan akan ditingkatkan kembali.	Sebagian besar mengatakan keseluruhan jalan membutuhkan strategi mengatasi lubang dan kecelakaan terutama pada saat hujan tiba.

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dengan adanya data **sekunder, observasi dan wawancara** langsung, maka prasarana jalan ini tergolong sedang / cukup memadai serta butuh perbaikan jalan.

5.1.2 Kondisi Infrastruktur Drainase

Kondisi drainase di Kecamatan Kampar mempunyai parameter desain sistem drainase berwawasan lingkungan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Kondisi Desain Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan

No.	Lokasi	Topografi	Jenis Tanah	Drainase Lingkungan
1.	Desa Penyesawan	Dataran tinggi	Lempung pasir	Kolam retensi, saluran terbuka Sumur Resapan Air Hujan, Biopori
2.	Desa Pulau Sarak	Dataran tinggi	Lempung pasir	Kolam retensi, saluran terbuka
3.	Desa Koto Tibun	Dataran tinggi	Lempung pasir	Kolam retensi, saluran terbuka Sumur Resapan Air Hujan, Biopori
4.	Desa Pulau Tinggi	Dataran tinggi	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block, taman, saluran tertutup
5.	Desa Air Tiris	Dataran tinggi (sebagian pegunungan)	Lempung pasir	Saluran terbuka
6.	Desa Bukit Ranah	Dataran Rendah	Lempung pasir	Polder, saluran terbuka pintu air
7.	Desa Rumbio	Dataran Rendah	Lempung pasir	Polder, saluran terbuka pintu air
8.	Desa Padang Mutung	Dataran tinggi	Lempung pasir	Kolam retensi, saluran terbuka SRAH, Biopori
9.	Desa Tanjung Rambutan	Dataran tinggi (sebagian Pegunungan)	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block,

				taman, saluran tertutup
10.	Desa Pulau Jambu	Dataran tinggi	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block, taman, saluran tertutup
11.	Desa Limau Manis	Dataran tinggi	Lempung pasir	SRAH, paving/grass block, taman, saluran tertutup
12.	Desa Naumbai	Dataran tinggi (sebagian Pegunungan)	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block, saluran tertutup
13.	Desa Ranah Baru	Dataran tinggi (sebagian Pegunungan)	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block, saluran tertutup
14.	Desa Ranah Singkuang	Dataran tinggi (sebagian Pegunungan)	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block
15.	Desa Batu Belah	Dataran tinggi (sebagian Pegunungan)	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block
16.	Desa Simpang Kubu	Dataran tinggi (sebagian Pegunungan)	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block
17.	Desa Ranah	Dataran tinggi	Lempung pasir	Subreservoir, Sumur Resapan Air Hujan, paving/grass block
18.	Desa Tanjung Berulak	Dataran tinggi (sebagian Pegunungan)	Lempung pasir	Subreservoir, SRAH, paving/grass block

Sumber : Dinas PU Kab.Kampar, 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah merealisasikan sistem drainase yang berwawasan lingkungan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan untuk kedepannya.

Data sekunder yang diperoleh salah satunya panjang keseluruhan saluran sistem drainase yang berada di 18 desa Kecamatan Kampar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.11 Sistem Saluran Drainase

No.	Nama Saluran	Panjang (m)
1.	Sal. Penyesawan	956.46
2.	Sal. Pulau Sarak	885.17
3.	Sal. Koto Tibun	107.52
4.	Sal. Pulau Tinggi	162.52
5.	Sal. Air Tiris	99.23
6.	Sal. Bukit Ranah	65.93
7.	Sal. Rumbio	217.52
8.	Sal. Padang Mutung	901.19
9.	Sal. Tanjung Rambutun	306.01
10.	Sal. Pulau Jambu	346.25
11.	Sal. Limau Manis	650.95
12.	Sal. Naumbai	639.94

13.	Sal. Ranah Baru	511.03
14.	Sal. Ranah Singkuang	1284.74
15.	Sal. Batu Belah	534.15
16.	Sal. Simpang Kubu	1331.78
17.	Sal. Ranah	1301.55
18.	Sal. Tanjung Berulak	464.72

Sumber : Dinas PU Kab. Kampar, 2019

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa saluran terpanjang dan mempunyai kapasitas yang besar di kecamatan Kampar yakni berada pada saluran Simpang kubu dengan panjang 1331.78 m.

Hasil analisis yakni terdapat 4 kondisi infrastruktur drainase yang bermasalah diantaranya di Desa Pulau Sarak, Desa Air Tiris, Desa Limau Manis, dan Desa Tanjung Berulak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Kondisi Saluran Sistem Saluran Drainase Bermasalah

No.	Kondisi Drainase Bermasalah	Panjang Saluran (m)	Panjang Saluran Rusak	Penyebab
1.	Sal. Air Tiris	99.3	35 m	Belum ada sistem polder & Paving/ Grass block
2.	Sal. Limau Manis	650.95	380.25 m	Tersumbat dan sebagian Paving/ Grass block
3.	Sal. Pulau Sarak	885.17	405 m	Belum ada sistem polder & Paving/ Grass block
4.	Sal. Tanjung Berulak	464.72	242 m	Belum ada sistem polder & Paving/ Grass block
Jumlah		2100.14	1062.25 m	Tersumbat, belum ada sistem polder dan Paving/grass block

Sumber : Hasil analisis dan Profil desa Kec.Kampar, 2019



Desa Air Tiris

Desa Limau Manis

Desa Pulau Sarak

Desa Tj. Berulak

Gambar 5.11 Sebagian Drainase Bermasalah

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Hasil dari analisis yang didapat bahwa saluran drainase yang banyak rusak terdapat pada saluran di Desa Pulau Sarak dengan panjang 405 m dan penyebab permasalahan drainase yang dominan yakni tersumbat, belum ada sistem polder serta paving/grass block.

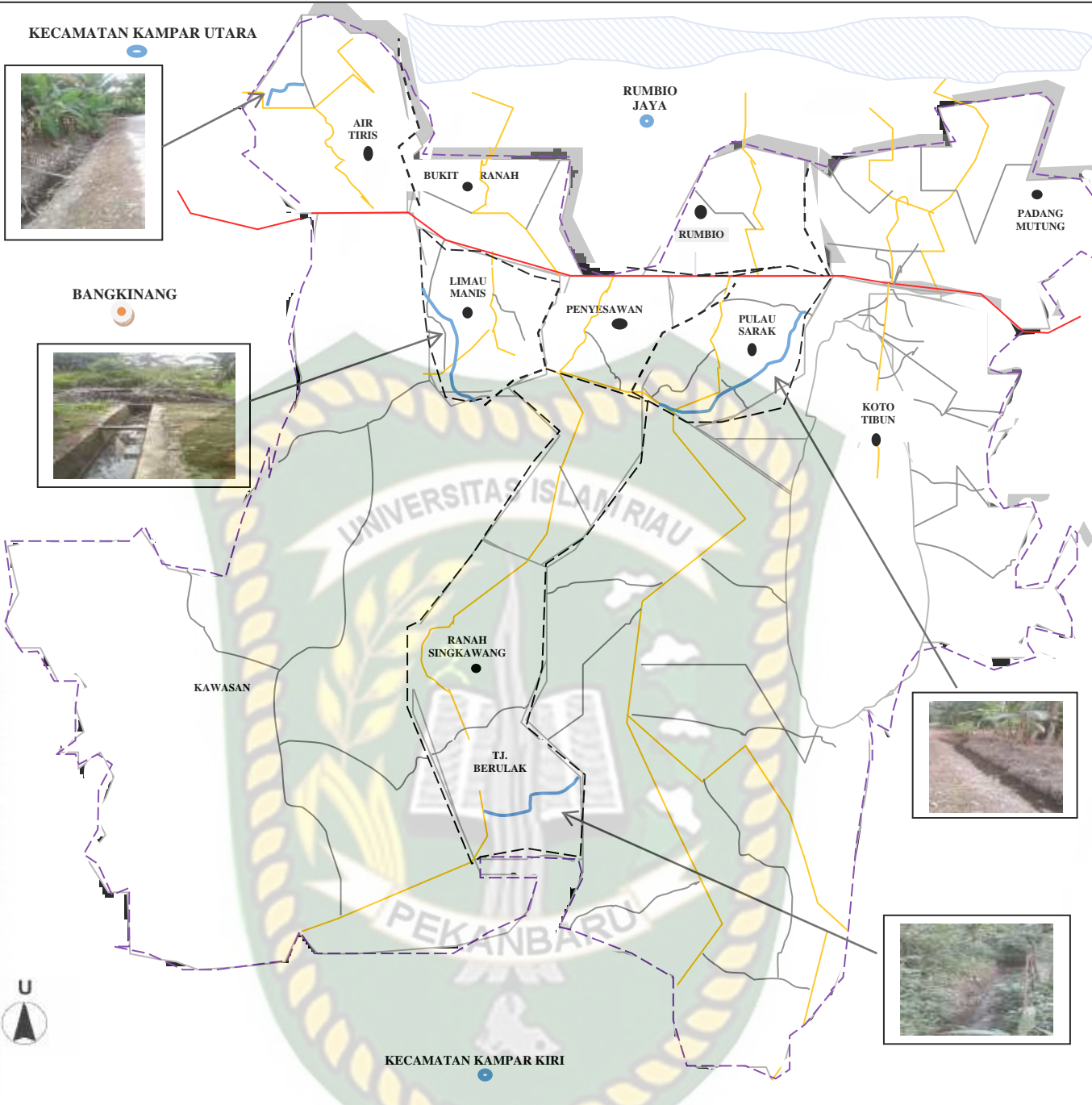
Hasil wawancara tentang pendapat pemerintah, aparat desa, & masyarakat yang menjadi tolak ukur pengembangan prasarana jaringan sehingga memudahkan membuat konsep dan realisasi perkembangan. Adapun hasil responden terhadap kondisi drainase dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5.13 Hasil Wawancara Responden Terhadap Drainase

No.	Nama	Pertanyaan	Wawancara
1.	Yurisdian (Aparat Pemerintah) Jabatan : Sub Bidang Perencanaan Dinas PU	a) Apakah sistem prasarana drainase di kecamatan Kampar sudah kondisional untuk masyarakat ? b) Apakah sudah ada sistem pembagian drainase di kecamatan kampar seperti drainase jalan raya, permukiman, pertanian dan sebagainya ?	a) Drainase kecamatan Kampar ini dikatakan masih tergolong biasa dan menyebabkan saluran tersumbat jadi membutuhkan banyak strategi fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air b) Untuk sistemnya sendiri sudah ada beberapa rencana dengan meminimalisir ancaman yaitu salah satu contohnya semenisasi drainase dan parameter desain sistem drainase.
2.	Darmansyah (Apara Desa) Jabatan : Kasi Pemerintahan Camat		c) Kalau dilihat masih wajar untuk pengaliran masyarakat, tapi dibutuhkan juga Pemilihan dimensi drainase dengan diperkirakan keamanan dan keekonomisannya d) Untuk sebagian desa sudah ada partisipasi masyarakat dalam pembuatan drainase dengan semenisasi sementara
3.	Budi "Masyarakat" Jabatan : Pedagang		e) Kalau untuk pemakaian rumah tangga, aliran drainase ini cukup layak. Tapi jika sudah hujan maupun banjir maka drainase ini akan kotor dan tersumbat oleh sampah yang berdatangan f) Kalau untuk system, sebagian masyarakat sudah antisipasi dengan menyemen sementara beberapa drainase tinggal kaitan masyarakat dan pemerintah.

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berikut merupakan gambaran dari saluran drainase yang bermasalah dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



TEKNIK PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Peta Sebagian Drainase Bermasalah
Kecamatan Kampar, Kab. Kampar

1:50.000



INSERT
KAWASAN



KETERANGAN :

- Kab/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Jaringan Jalan :

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Kedudukan Kecamatan Kampar dalam Kab. Kampar
- Perairan / Sungai
- Drainase

Nama : YUDISTIRA MUHAMMAD
NPM : 133410354
PEMBIMBING I : Febby Asteriani, ST, MT
PEMBIMBING II : Rona Muliana, ST, MT

Sumber :
1. Survey Lapangan Tahun 2018
2. Hasil Analisis Tahun 2019

GAMBAR 5.12 PETA SEBAGIAN DRAINASE KECAMATAN KAMPAR

Kesimpulan sasaran kondisi infrastruktur drainase dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.14 Kesimpulan Tiap Sub Sasaran

Data Sekunder	Observasi	Wawancara
Data dari Dinas PU Kab.Kampar, 2019 yakni adanya sistem drainase berwawasan lingkungan 18 desa, tapi 4 diantaranya sedikit bermasalah	Proses interaksi dan kondisi program drainase sebagian besar sudah ditingkatkan hanya saja ada realisasi beberapa drainase dan pemeliharaan bergilir	Sudah ada sistemnya sendiri dari masyarakat & pemerintah untuk meminimalisir ancaman, tapi membutuhkan penampung, pembagi, dan pembuang yang lebih kompleks.

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dengan adanya data **sekunder, observasi dan wawancara** langsung, maka prasarana drainase ini tergolong cukup memadai dengan dominan cukup terorganisir dan baik.

5.1.3 Kondisi Infrastruktur Air Bersih

Salah satu cara untuk memperoleh air bersih di kecamatan Kampar adalah dengan memanfaatkan pelayanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Untuk mencapai pengadaan air bersih yang merata sangatlah tidak mudah, hal ini dikarenakan banyaknya resiko maupun biaya dalam pemenuhan kebutuhan ini. Resiko ini dapat bersifat teknis maupun non teknis. Misalnya masalah teknis banyaknya daerah yang tidak memungkinkan dipasang saluran pipa air bersih dan kemudian juga masalah non teknis yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mengerti tentang pipa air bersih.



Gambar 5.13 PDAM Tirta Kampar
Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Kecamatan Kampar dengan luas wilayah 14365,68 Ha memiliki tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang cukup tinggi sehingga tingkat kebutuhan

sarana prasarana penyediaan air bersih sangat besar. Jumlah penduduk di Kecamatan Kampar sebanyak 48.649 Jiwa. Ditinjau dari angka kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka sarana yang tersedia perlu dioptimalkan lagi baik dari segi pelayanan dan penyediaan sarana air bersih itu sendiri. Oleh sebab itu, dibuatlah perencanaan jaringan pipa distribusi air bersih di Kecamatan Kampar yang berupaya menyediakan sistem pengaliran air bersih secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kualitas air yang dihasilkan PDAM Tirta Kampar Kecamatan Kampar sebatas air bersih tetapi belum dapat memenuhi kriteria sebagai air minum. Sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Kampar Kecamatan Kampar adalah air permukaan yang berasal dari sungai kampar dan danau buatan dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

Banyak pelanggan PDAM Tirta Kampar yang mengeluh karena kecilnya air yang sampai ke bak penampungan, tak hanya itu air tersebut juga keruh dan berwarna kekuningan sehingga wadah penampungan air PDAM harus dibersihkan. PDAM Tirta Kampar harus berpikir strategis dan sesuai dengan perkembangan Kecamatan Kampar. Prioritas utama PDAM sekarang ini adalah membenahi kualitas kebersihan air, terlebih lagi setelah banyaknya pengaduan dari pelanggan yang mengeluhkan air yang dialiri oleh PDAM berwarna coklat dan juga pembenahan pada proses produksi sehingga tidak mengalami kebocoran. Idealnya, kapasitas produksi PDAM diatas kebutuhan masyarakat. Karena sebenarnya, PDAM bisa memperkirakan kebutuhan air berdasarkan laju pertumbuhan penduduk. Namun kenyataannya PDAM Tirta Kampar tidak mampu mengantisipasi untuk memenuhi kebutuhan air dimasyarakat.

Adapun tingkat kebutuhan air pada masing-masing desa dengan asumsi kebutuhan air domestik penduduk perjiwa yaitu 144 Liter. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Jumlah Kebutuhan Air Domestik Kecamatan Kampar

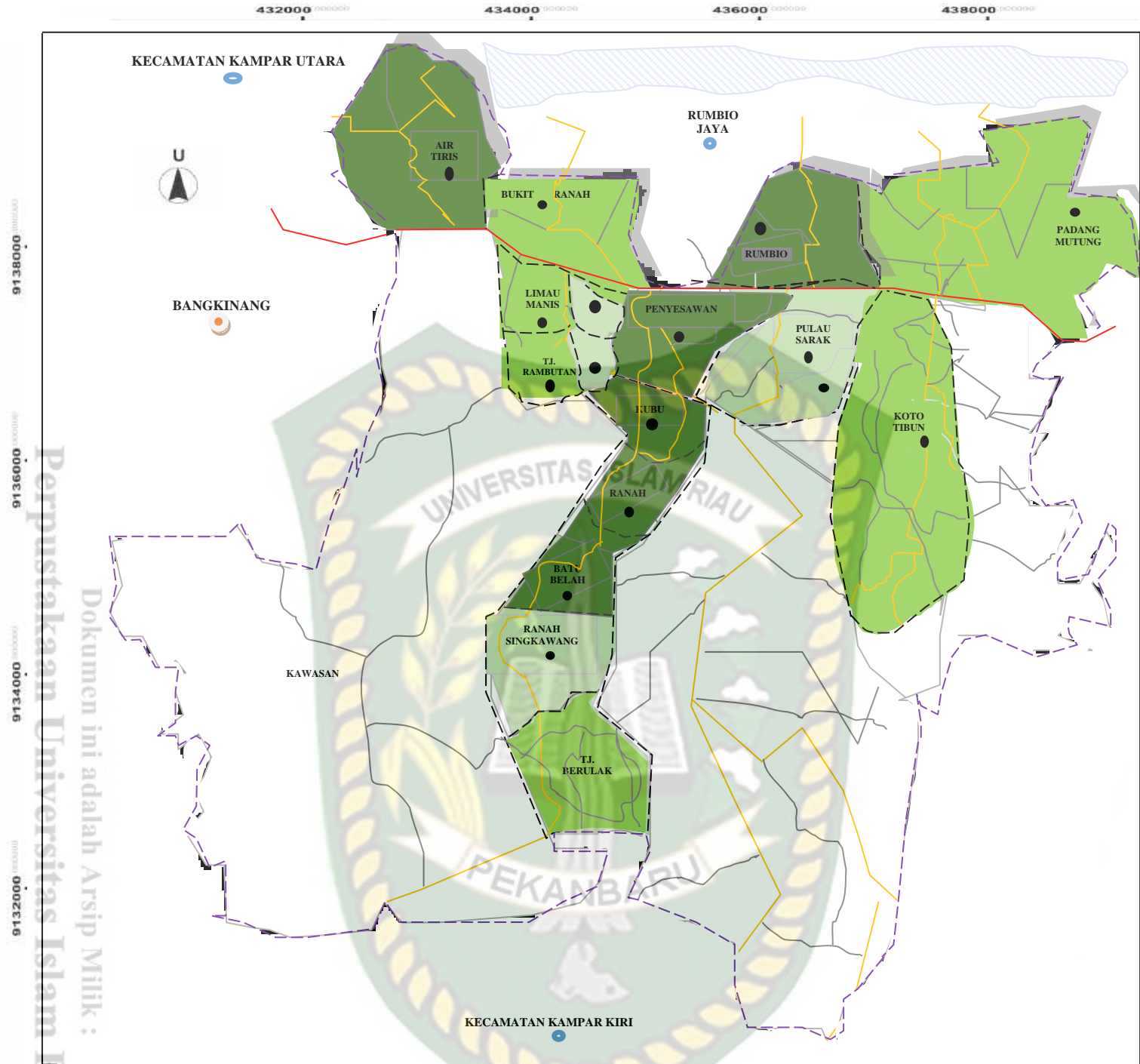
No.	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah ($N \times 144$ Liter)
1.	Air Tiris	6405	922.320 L
2.	Penyesawan	5428	781.632 L
3.	Simpang Kubu	5208	749.952 L
4.	Batu Belah	5058	728.352 L
5.	Ranah	3461	498.384 L
6.	Rumbio	3332	479.808 L

7.	Tanjung Rambutan	3262	469.728 L
8.	Padang Mutung	2838	408.672 L
9.	Tanjung Berulak	2241	322.704 L
10.	Limau Manis	2168	312.192 L
11.	Koto Tibun	2123	305.712 L
12.	Bukit Ranah	2088	300.672 L
13.	Naumbai	2023	291.312 L
14.	Pulau Tinggi	1756	252.864 L
15.	Pulau Jambu	1556	224.064 L
16.	Ranah Singkuang	1145	164.880 L
17.	Ranah Baru	1118	160.992 L
18.	Pulau Sarak	1039	149.616 L
	JUMLAH	48649	7.523.856 L


Sumber : PDAM Tirta Kampar & Dinas PU Kab.Kampar, 2019

Desa yang memiliki jumlah penduduk tertinggi secara otomatis juga menjadi daerah dengan tingkat kebutuhan air domestik yang paling tinggi juga, yaitu Desa Air Tiris dengan jumlah penduduk 6.405 jiwa dan tingkat kebutuhan air domestik penduduk sebesar 922.320 liter. Sedangkan untuk Desa dengan jumlah penduduk paling rendah juga secara otomatis menjadi Desa dengan tingkat kebutuhan air domestik paling rendah juga yaitu Desa Pulau Sarak dengan jumlah penduduk 1039 jiwa dengan tingkat kebutuhan air domestik sebesar 149.616 liter.

Dalam pembuatan peta jumlah penduduk dan peta tingkat kebutuhan air domestik menggunakan simbol bidang dengan warna, warna yang digunakan adalah gradasi warna. Warna terang memvisualkan data yang rendah, sedangkan semakin warna yang semakin gelap memvisualkan data yang semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta berikut ini :









**TEKNIK PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK**
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU



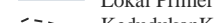



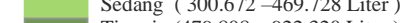
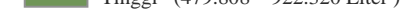
**Peta Tingkat Kebutuhan Air Domestik
Kecamatan Kampar, Kab. Kampar**
 1:50.000




KETERANGAN :

-  Kab/Kota
-  Kecamatan
-  Desa/Kelurahan
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa

Jaringan Jalan :

-  Arteri Primer
-  Kolektor Primer
-  Lokal Primer
-  Kedudukan Kecamatan Kampar dalam Kab. Kampar
-  Perairan / Sungai
-  Rendah (149.616 – 291.312 Liter)
-  Sedang (300.672 – 469.728 Liter)
-  Tinggi (479.808 – 922.320 Liter)

Nama : YUDISTIRA MUHAMMAD
 NPM : 133410354
 PEMBIMBING I : Febby Asteriani, ST, MT
 PEMBIMBING II : Rona Muliana, ST, MT

Sumber :
 1. Survey Lapangan Tahun 2018
 2. Hasil Analisis Tahun 2019

GAMBAR 5.14 PETA TINGKAT KEBUTUHAN AIR DOMESTIK KECAMATAN KAMPAR

Dalam pemetaan tingkat ketersediaan air di Kecamatan Kampar dapat diketahui mengenai tingkat kebutuhan air domestik pada masing masing desa dan dapat mengetahui distribusi tingkat kebutuhan air domestik di Kecamatan Kampar.

Dalam pembagian tingkat kebutuhan air domestik dihubungkan dengan jumlah penduduk masing-masing desa, sehingga di Kecamatan Kampar dapat dikelaskan menjadi 3 kelas yaitu sebagai berikut:

1. Kelas rendah, yang meliputi ; Naumbai, Pulau Tinggi, Pulau Jambu, Ranah Singkuang, Ranah Baru, Pulau Sarak.
2. Kelas Sedang, yang meliputi : Tanjung Rambutan, Padang Mutung, Tanjung Berulak, Limau Manis, Koto Tibun, Bukit Ranah.
3. Kelas Tinggi, yang meliputi : Air Tiris, Penyesawan, Simpang Kubu, Batu Belah, Ranah, Rumbio.

Berikut merupakan jumlah pelanggan PDAM Tirta Kampar di Kecamatan Kampar pada tahun 2018 – 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.16 Jumlah Pelanggan Tirta Kampar di Kec. Kampar Tahun 2018-2019

No.	Bulan	Jumlah Pelanggan
1.	September	2239
2.	Oktober	2221
3.	November	2208
4.	Desember	2119
5.	Januari	2056
6.	Februari	2041
7.	Maret	2018
8.	April	2023
9.	Mei	2026
10.	Juni	2015
11.	Juli	2005
12.	Agustus	2001
	Jumlah	24.972

Sumber : PDAM Tirta Kampar, 2019

Tabel diatas menjelaskan tentang penurunan jumlah pelanggan dikecamatan Kampar dirasakan setiap tahunnya. Keluhan masyarakat dikecamatan kampar juga mengenai air yang keruh dan sering mengalami kemacetan. Kerusakan dalam hal teknis inilah yang seharusnya PDAM Tirta Kampar perbaiki terlebih dahulu dan

harus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Agar masyarakat dipekanbaru tidak beralih atau memutuskan untuk tidak berlangganan di PDAM Tirta Kampar.

Adapun kondisi peralatan PDAM Tirta Kampar ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.17 Kondisi Peralatan PDAM Tirta Kampar

No.	Peralatan	Kondisi	Persen (%)
1.	Pompa	Rusak	25 %
2.	Pipa transmisi dan Distribusi	Bocor	45 %
3.	Pompa dan Pipa Transmisi dan distribusi	Baik	30 %
Jumlah			100 %

Sumber : PDAM Tirta Kampar, 2019

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 100% kondisi peralatan milik PDAM Tirta Kampar, lebih banyak yang rusak dan bocor dibanding kondisinya yang baik 70% peralatan yang dimiliki perusahaan PDAM Tirta Kampar sebagai perusahaan pemasok air bersih di Kecamatan Kampar dalam kondisi rusak, yaitu yang rusak 25% meliputi pompa (pompa pengambilan air baku, pompa distribusi dan pompa dosing) dan yang bocor ada 45% yaitu pipa transmisi dan distribusi. Dari keseluruhan peralatan yang dimiliki PDAM hanya sekitar 30% yang bisa digunakan, baik itu pompanya maupun pipa transmisi dan distribusi. Selain itu jangkauan jaringan pipa masih tergolong rendah, kurang efisiennya instalasi yang ada karena sudah berumur tua (lama).

Dari data diatas menunjukkan permasalahan dengan banyak fenomena yang terjadi dalam proses penyediaan air bersih oleh PDAM di Kecamatan Kampar terutama dalam hal kualitas pelayanan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar terutama kepada pelanggannya, antara lain :

Tabel 5.18 Penyebab Permasalahan PDAM Tirta Kampar

Pelayanan	Permasalahan
PDAM Tirta Kampar	a) Kerusakan pipa-pipa saluran air b) Keterbatasan stok air c) Tidak jernihnya air yang dialirkan kepada masyarakat d) Kemacetan penyaluran air yang mengakibatkan kecilnya jumlah air yang disalurkan e) Tarif yang berlaku masih rendah sehingga membuat PDAM Tirta Kampar tidak bisa beroperasi secara maksimal

Sumber : Hasil analisis, 2019



Gambar 5.15 Sistem PDAM Bermasalah
 Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Tingkat kemampuan PDAM yang belum mampu bekerja dengan sigap dalam melakukan perbaikan pompa atau pipa yang rusak, Belum maksimalnya kualitas tersebut menimbulkan keraguan dari masyarakat akan kinerja pelayanan dari PDAM Tirta Kampar. Maka, akibatnya berdampak pada menurunnya jumlah pelanggan PDAM Tirta Kampar dari tahun ke tahun.

Dari hasil wawancara menunjukkan tentang pendapat dari pemerintah, aparat desa, dan masyarakat yang menjadi tolak ukur pengembangan prasarana jaringan sehingga memudahkan untuk membuat konsep dan realisasi dari perkembangan ini. Adapun hasil responden terhadap kondisi air bersih dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5.19 Hasil Wawancara Responden Terhadap Air Bersih

No	Nama	Pertanyaan	Wawancara
1.	Yurisdian (Aparat Pemerintah) Jabatan : Sub Bidang Perencanaan Dinas PU	a) Sebutkan sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga bapak/ibu untuk keperluan air minum dan sebagainya ? b) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas air bersih dalam pemakaian sehari-hari ?	a) Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari yakni adanya fasilitas PDAM (perusahaan daerah air minum) b) Upaya yang dilakukan yakni dengan memasang system perpipaan dan pengelompokkan perpipaan yang fungsinya digunakan berbagai macam kebutuhan misalnya minum, mandi, perkebunan dan sebagainya
2.	Darmansyah (Apara Desa) Jabatan : Kasi Pemerintahan Camat		c) Ada beberapa penyediaan air bersih di kecamatan Kampar diantaranya PDAM meski sebagian masyarakat menggunakan alternatif air lainnya d) Ada beberapa system upaya yang dilakukan menjaga kualitas dengan berbagai pengelompokkan diantaranya sumber air berasal dari sungai, bak penampung air bersih, dan pompa sumur bor.
3.	Budi "Masyarakat" Jabatan : Pedagang		e) Memang air yang digunakan didapat dari PDAM, tapi sebagian masyarakat juga banyak memanfaatkan sungai, dan galian sumur atau mesin air bor. f) Kalau misalnya PDAM berkurang pemasokaannya, maka masyarakat menggunakan alternatif air sungai dan sebagainya.

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Kesimpulan sasaran kondisi infrastruktur air bersih dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Kesimpulan Tiap Sub Sasaran

Data Sekunder	Observasi	Wawancara
Data dari PDAM Tirta Kampar, 2019 pelanggan menurun dengan jumlah 24.972 jiwa disebabkan kondisi peralatan PDAM yakni rusak 25%, bocor 45%, baik hanya 30%.	Pihak terkait sudah menerapkan berbagai cadangan air bersih seperti PDAM, Pamsimas, Bak penampungan, sumur, dan lain sebagainya.	Selain PDAM, masyarakat menggunakan alternatif air lainnya, berasal dari sungai, bak penampungan, pompa sumur bor, dan lain sebagainya.

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dengan adanya data **sekunder, observasi dan wawancara** langsung, maka prasarana air bersih ini tergolong cukup memadai dan butuh perbaikan kondisi peralatan PDAM dan realisasi penanganan air bersih.

5.2 Kebijakan Pemerintah Dalam RKPD dan Arah Kebijakan Bidang Cipta Karya sesuai Kebutuhan Anggaran

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur ini maka diperlukan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Rencana kerja daerah biasanya dirumuskan ke dalam RKPD yang diadakan satu tahun sekali. Berdasarkan pelaksanaan Musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kampar, setelah forum tingkat desa dan menghasilkan beberapa usulan yang nantinya menuju ke forum Musrenbang Kecamatan Kampar. Hal ini kemudian diikuti oleh keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Arah Kebijakan pembangunan bidang cipta karya kabupaten Kampar periode 2014-2019 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, programnya yaitu :

- a) Program pembangunan infrastruktur jalan pedesaan
- b) Program pembangunan saluran drainase
- c) Program pengembangan kinerja pengelolaan air

Dalam program diatas untuk memajukan infrastruktur pelaksanaan alokasi anggaran pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pembangunan disuatu daerah. Rencana keuangan tahunan daerah yang disusun dan dibahas serta disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Indonesia, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah, akan tetapi permasalahan juga ikut munculdengan keterbatasan anggaran yang ada.

Pada tingkat Kecamatan pelaksanaan lanjut dari APBD tersebut dibahas melalui Musrenbang Kecamatan Kampar untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang desa yang dilakukan di tempat yang disepakati, dan menghasilkan beberapa usul. Hasilnya Musrenbang Kecamatan dapat mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan ditingkat kecamatan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan Musrenbang dilaksanakan ditempat yang disepakati bersama. Dengan hasil pengamatan melakukan perbandingan dengan kondisi jalan, drainase, dan air bersih di Kecamatan Kampar tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.21 Pengelompokan Kondisi Prasarana Bermasalah

Jalan	Drainase	Air Bersih
Kesimpulan yang terdapat dari semua analisis jalan maka yang paling terbesar/ dominan bermasalah sehingga dibutuhkan realisasi yakni terdapat pada Kebutuhan Perbaikan Jalan dengan panjang keseluruhan 43.003 m	Sal. Air Tiris dengan panjang rusak 35 m, Sal. Limau Manis dengan panjang rusak 380.25 m, Sal. Pulau Sarak dengan panjang rusak 405 m, dan Sal. Tanjung Berulak dengan panjang rusak 242 m. maka penyebab keseluruhan yakni Tersumbat, belum ada sistem polder dan Paving/ grass block	a) Kerusakan pipa-pipa saluran air b) Keterbatasan stok air c) Tidak jernihnya air yang dialirkan kepada masyarakat d) Kemacetan penyaluran air yang mengakibatkan kecilnya jumlah air yang disalurkan e) Tarif yang berlaku masih rendah sehingga membuat PDAM Tirta Kampar tidak bisa beroperasi secara maksimal

Sumber : hasil analisis, 2019

Hal ini diketahui dengan hasil analisis dan permasalahan kondisi prasarana yang sudah dibahas pada hasil sebelumnya yang menunjukkan ada beberapa prasarana yang memang harus direalisasikan secepat mungkin. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan 3 infrastruktur di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tahun 2019 mengalami **keterlambatan dalam pengalokasian dana Anggaran, sehingga, kebijakan pengalokasian dan pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan** berdasarkan alokasi anggaran tersebut adanya keterlambatan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah kepada Kecamatan Kampar.

**Tabel 5.22 Hasil Wawancara Responden
Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam RKPD**

No.	Nama	Pertanyaan	Wawancara
1.	Yurisdian (Aparat Pemerintah) Jabatan : Sub Bidang Perencanaan Dinas PU	Bagaimana keadaan infrastruktur sekarang, apakah sudah nyaman dan memadai ? jika belum, apa faktornya ?	a) Keadaan infrastruktur sekarang masih dikatakan normal, sebab pihak terkait beberapa sudah mulai ikut andil dalam pengembangan infrastruktur.
2.	Darmansyah (Apara Desa) Jabatan : Kasi Pemerintahan Camat		b) Dikatakan nyaman iya, dengan infrastruktur prasarana yang sudah ada dan cukup memadai untuk digunakan ataupun aktivitas sehari-hari dan ditambah lagi anggaran dana yang sudah dialokasikan.
3.	Budi "Masyarakat" Jabatan : Pedagang		c) Nyaman, tapi beberapa prasarana yang ada masih dikatakan kurang seperti drainase yang harus diperbaiki kondisinya, jalan yang harus direalisasikan keadaannya, serta ditambahnya infrastruktur yang memadai. Mungkin penyebabnya dana alokasi yang kurang memadai sehingga terjadinya permasalahan.

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Kesimpulan sasaran kebijakan pemerintah dalam RKPD & Arah kebijakan bidang cipta karya dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.23 Kesimpulan Tiap Sub Sasaran

Data Sekunder	Observasi	Wawancara
Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No.8 Tahun 2008 pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan bidang cipta karya kabupaten Kampar periode 2014-2019	Adanya forum Tingkat desa dan menghasilkan beberapa usulan yang nantinya menuju musrenbang kecamatan Kampar dalam pengembangan prasarana.	Dana yang sudah ada dialokasikan, tapi masih ada keadaan yang kurang nyaman dan tidak merata mungkin dana alokasi yang kurang memadai sehingga terjadi permasalahan.

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dengan adanya data **sekunder, observasi dan wawancara** langsung, maka kebijakan ini tergolong cukup memadai dan butuh realisasi penanganan berkelanjutan.

5.3 Strategi Pengembangan Prasarana Jaringan

Menentukan strategi pengembangan prasarana maka dijabarkan hasil analisis permasalahan sebelumnya yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.24 Rangkuman Permasalahan Kondisi Prasarana dan Kebijakan Pemerintah

No.	Indikator	Permasalahan
1.	Jalan	Kesimpulan yang terdapat dari semua analisis jalan maka yang paling terbesar/ dominan bermasalah sehingga dibutuhkan realisasi yakni terdapat pada Kebutuhan Perbaikan Jalan dengan panjang keseluruhan 43.003 m .
	Drainase	Hasil dari analisis yang didapat bahwa saluran drainase yang banyak rusak terdapat pada saluran di Desa Pulau Sarak dengan panjang 405 m dan penyebab permasalahan drainase yang dominan yakni tersumbat, belum ada sistem polder serta paving/grass block.
	Air Bersih	Pelayanan PDAM Tirta Kampar : a) Kerusakan pipa-pipa saluran air b) Keterbatasan stok air c) Tidak jernihnya air yang dialirkan kepada masyarakat

		<p>d) Kemacetan penyaluran air yang mengakibatkan kecilnya jumlah air yang disalurkan</p> <p>e) Tarif yang berlaku masih rendah sehingga membuat PDAM Tirta Kampar tidak bisa beroperasi secara maksimal</p>
2.	Kebijakan pemerintah dalam RKPD & arah kebijakan bidang cipta karya sesuai kebutuhan anggaran	Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan 3 infrastruktur di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tahun 2019 mengalami keterlambatan dalam pengalokasian dana Anggaran sehingga, kebijakan pengalokasian dan pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan berdasarkan alokasi anggaran tersebut adanya keterlambatan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah kepada Kecamatan Kampar

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Kesimpulan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator yang dijabarkan mempunyai permasalahan masing-masing dan harus direalisasikan untuk kedepannya agar lebih baik lagi.

5.3.1 Hasil Analisis Taksonomi (*Taksonomic Analysis*)

Meningkatkan pembangunan prasarana kecamatan diperlukan program-program yang tepat dengan strategi yang tersedia. Aplikasi pendekatan Taksonomi menjadi salah satu alat yang digunakan untuk merancang program tersebut. Adapun matriks Taksonomi yang dianalisa yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.25 Matriks Taksonomi untuk meningkatkan pengembangan prasarana

<u>Permasalahan / Kelemahan (Weakness I)</u>			<u>Asumsi Strategi (SATW I)</u>	<u>Asumsi Strategi (SATW II)</u>	<u>Permasalahan / Kelemahan (Weakness II)</u>		
<p>Dibutuhkan realisasi yakni pada kebutuhan perbaikan jalan dengan panjang 43.003 m, Drainase tersumbat, belum ada sistem polder sert <i>paving/grassblock</i> dan pelayanan PDAM Tirta Kampar dengan kerusakan pipa, keterbatasan stok air, air tidak jernih, kemacetan saluran air, tarif masih rendah sehingga PDAM Tirta Kampar tidak beroperasi secara maksimal.</p>					<p>keterlambatan dalam pengalokasian dana Anggaran, sehingga kebijakan pengalokasian dan pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.</p>		
<u>Ancaman/ Threats (T)</u>	<u>Aktivitas/Activity (A)</u>	<u>Kekuatan/ Strength (S)</u>	<p>Dengan adanya program pemeliharaan jalan, sistem drainase berwawasan lingkungan dan jaringan PDAM Tirta Kampar masyarakat & pihak terkait akan lebih gencar dalam mengadakan kebutuhan terkait zona jalan, Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan & manajemen, alternative sumber air masyarakat akan meminimalisir terjadinya kecelakaan, banjir, dan kurangnya pelanggan PDAM, sehingga peningkatan kebutuhan perbaikan jalan, Drainase tersumbat, polder dan <i>paving/grassblock</i> yang belum ada serta pelayanan PDAM akan terlaksana & dimanfaatkan dengan baik.</p>	<p>Dengan adanya basis rencana (<i>roadmap</i>) dari musrenbang desa akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi modern demi menunjang efektivitas prasarana dan meningkatkan jaringan komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait sehingga meminimalisir keterlambatan pengalokasian dana anggaran sesuai kegiatan dilapangan.</p>	<u>Kekuatan/ Strength (S)</u>	<u>Aktivitas /Activity (A)</u>	<u>Ancaman/ Threats (T)</u>
<p>Terjadinya kecelakaan Berkurangnya pelanggan PDAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak terkait mengadakan kebutuhan terkait jalan - Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan & manajemen partisipasi prasarana desa - Alternatif sumber air masyarakat (sungai, air hujan, sumur, pompa) 	<p>Adanya pemeliharaan jalan, sistem drainase berwawasan lingkungan, dan jaringan PDAM Tirta Kampar</p>			<p>Musrenbang desa dengan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program pembangunan infrastruktur jalan desa, pembangunan saluran drainase, pengembangan kinerja pengelolaan air</p>	<p>Kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi modern demi menunjang efektivitas prasarana.</p>	<p>Jaringan dan komunikasi yang kurang baik dengan masyarakat dan pihak terkait menyebabkan perencanaan pengembangan prasarana kurang.</p>

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Perencanaan matriks Taksonomi diatas dibuat untuk menentukan perencanaan pengembangan prasarana yang ingin dicapai dalam penyelesaian fokus masalah di kecamatan Kampar adalah sebagai berikut :

Untuk sasaran I Kondisi Prasarana :

Kekuatan/ *Strength*(S) adalah Adanya pemeliharaan jalan, sistem drainase berwawasan lingkungan, dan jaringan PDAM Tirta Kampar.

Aktivitas/ *Activity*(A) adalah Pihak terkait mengadakan kebutuhan terkait jalan, Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan & manajemen partisipasi prasarana desa serta Alternatif sumber air masyarakat (sungai, air hujan, sumur, pompa).

Ancaman/ *Threat*(T) adalah Terjadinya kecelakaan, Terjadinya banjir, Berkurangnya pelanggan PDAM

Permasalahan/ Kelemahan *Weakness*(W) adalah dibutuhkan realisasi yakni pada kebutuhan perbaikan jalan dengan panjang 43.003 m, Drainase tersumbat, belum ada sistem polder sert *paving/grassblock* dan pelayanan PDAM Tirta Kampar dengan kerusakan pipa, keterbatasan stok air, air tidak jernih, kemacetan saluran air, tarif masih rendah sehingga PDAM Tirta Kampar tidak beroperasi secara maksimal.

Asumsi Strategi (SATW) adalah Dengan adanya program pemeliharaan jalan, sistem drainase berwawasan lingkungan dan jaringan PDAM Tirta Kampar masyarakat & pihak terkait akan lebih gencar dalam mengadakan kebutuhan terkait zona jalan, Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan & manajemen, alternative sumber air masyarakat akan meminimalisir terjadinya kecelakaan, banjir, dan kurangnya pelanggan PDAM, sehingga peningkatan kebutuhan perbaikan jalan, Drainase tersumbat, polder dan *paving/grassblock* yang belum ada serta pelayanan PDAM akan terlaksana & dimanfaatkan dengan baik.

Untuk sasaran II Kebijakan Pemerintah :

Kekuatan/ *Strength*(S) adalah Musrenbang desa dengan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program

pembangunan infrastruktur jalan desa, pembangunan saluran drainase, pengembangan kinerja pengelolaan air.

Aktivitas/ Activity(A) adalah Kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi modern demi menunjang efektivitas prasarana.

Ancaman/ Threat(T) adalah Jaringan dan komunikasi yang kurang baik dengan masyarakat dan pihak terkait menyebabkan perencanaan pengembangan prasarana kurang.

Permasalahan/ Kelemahan Weakness(W) adalah keterlambatan dalam pengalokasian dana Anggaran, sehingga kebijakan pengalokasian dan pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Asumsi Strategi (SATW) adalah dengan adanya basis rencana (*roadmap*) dari musrenbang desa akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi modern demi menunjang efektivitas prasarana dan meningkatkan jaringan komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait sehingga meminimalisir keterlambatan pengalokasian dana anggaran sesuai kegiatan dilapangan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

a. Kondisi Prasarana Jaringan .

Kondisi jalanan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar hingga saat ini hampir keseluruhan jalanan perbatasan Desa itu masih sedikit terealisasi dengan baik, masih banyak jalanan aspal bebatuan bercampur dengan tanah liat, tetapi ada realisasi dari pihak terkait dengan 4 kategori kebutuhan yakni, kebutuhan pembuatan jalan baru, kebutuhan pembuatan jalan aspal/paving, kebutuhan perbaikan jalan, dan kebutuhan pemeliharaan jalan. Kondisi Drainase Kecamatan Kampar ini ada realisasi dengan memanfaatkan parameter desain sistem drainase yang terbagi berdasarkan kelompok klasifikasinya seperti panjang, topografi, dan sistem perbaikan berwawasan lingkungan. Kondisi Air Bersih di kecamatan Kampar adalah dengan memanfaatkan pelayanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan alternatif lainnya seperti sumur, air hujan, sungai, dan sebagainya.

b. Kebijakan Pemerintah dalam RKPD & Arah Kebijakan Bidang Cipta Karya dengan Kebutuhan Anggaran

Desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Rencana kerja daerah dirumuskan ke dalam RKPD yang diadakan satu tahun sekali. Berdasarkan pelaksanaan Musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Hal ini kemudian diikuti oleh keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Arah Kebijakan pembangunan bidang cipta karya kabupaten Kampar periode 2014-2019 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat

menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, programnya yaitu : Program pembangunan infrastruktur jalan pedesaan, Program pembangunan saluran drainase, dan Program pengembangan kinerja pengelolaan air

**c. Berdasarkan Strategi Pengembangan Prasarana Jaringan Kecamatan
Kampar**

Perencanaan matriks Taksonomi dibuat untuk menentukan perencanaan pengembangan prasarana yang ingin dicapai dalam penyelesaian fokus masalah di kecamatan Kampar adalah sebagai berikut : Untuk sasaran I Kondisi Prasarana : **Asumsi Strategi (SATW)** adalah Dengan adanya program pemeliharaan jalan, sistem drainase berwawasan lingkungan dan jaringan PDAM Tirta Kampar masyarakat & pihak terkait akan lebih gencar dalam mengadakan kebutuhan terkait zona jalan, Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan & manajemen, alternative sumber air masyarakat akan meminimalisir terjadinya kecelakaan, banjir, dan kurangnya pelanggan PDAM, sehingga peningkatan kebutuhan perbaikan jalan, Drainase tersumbat, polder dan *paving/grassblock* yang belum ada serta pelayanan PDAM akan terlaksana & dimanfaatkan dengan baik, Untuk sasaran II Kebijakan Pemerintah : **Asumsi Strategi (SATW)** adalah dengan adanya basis rencana (*roadmap*) dari musrenbang desa akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi modern demi menunjang efektivitas prasarana dan meningkatkan jaringan komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait sehingga meminimalisir keterlambatan pengalokasian dana anggaran sesuai kegiatan dilapangan.

6.2 Saran

Adapun hasil & pembahasan berikut ini ada hal yang perlu dijadikan sebagai bahan rekomendasi, antara lain :

- a. Pemerintah dan pihak terkait dapat menjadikan analisis taksonomi yang telah dilakukan sebagai dasar melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat desa. Namun taksonomi belum mencakup kepada fungsi analisis lain seperti analisis biaya – manfaat dan sebagainya. Untuk menyempurnakan rencana strategis peningkatan prasarana kecamatan secara tepat, maka analisis-analisis tersebut masih perlu dilakukan.

- b. Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya untuk mendukung tercapainya misi yaitu bersama masyarakat dan kelembagaan desa untuk meningkatkan pengembangan pembangunan prasarana..



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



LAMPIRAN

LEMBAR WAWANCARA

Tanggal : _____

Waktu : (Pagi/ Siang/ Sore/ Malam)

No. Responden

Wawancara ini disebarkan sebagai masukan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul **“Strategi Pengembangan Prasarana Jaringan Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar”** sehingga membutuhkan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi wawancara ini. Hasil dari jawaban wawancara ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian saja dan bersifat rahasia.

Hormat saya,

YUDISTIRA MUHAMMAD

Latar Belakang Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan

Umur :

Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SD SD/Sederajat
SMP/Sederajat

SMA/Sederajat Diploma/ S1 S2/S3

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Pegawai

Wiraswasta Lainnya, : _____

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Kondisi Prasarana

- 1) Berikan contoh perencanaan berdampak strategis yang pernah dibuat bagi (instansi/organisasi) kecamatan kampar ?

Jawaban :

- 2) Bagaimana kondisi jalan di kecamatan kampar saat ini ? Apakah harus ada perbaikan & perubahan struktur jalan ?

Jawaban :

- 3) Apakah sistem prasarana drainase di kecamatan Kampar sudah kondisional untuk masyarakat ?

Jawaban :

- 4) Apakah sudah ada sistem pembagian drainase di kecamatan kampar seperti drainase jalan raya, permukiman, pertanian dan sebagainya ?

Jawaban :

- 5) Sebutkan sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga bapak/ibu untuk keperluan air minum dan sebagainya ?

Jawaban :

- 6) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas air bersih dalam pemakaian sehari-hari ?

Jawaban :

B. Kebijakan Pemerintah Perencanaan Prasarana

- 7) Bagaimana keadaan infrastruktur sekarang, apakah sudah nyaman dan memadai ? jika belum, apa faktornya ?

Jawaban :



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Jaringan Transportasi; Teori dan Analisis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- A.S Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Prasarana*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal : 13-18.
- Asteriani Feby, Dinata Apriyan, Syafitri. 2015. *Kinerja Pelayanan Dan Operasional PDAM Tirta Kampar Terhadap Kebutuhan Air Bersih Kota Bangkinang, Provinsi Riau*
- Bintarto. 1989., dalam khairudin. 2001. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya dari Dampak Sarana Prasarana*. Desa Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- D.W., Robet van der hoff, 1993 *Manajemen pembangunan prasarana perkotaan*, Florina steainberg
- Hamalik, Oemar. 2000. *Prasarana Jaringan : Sinar Baru Al Gesindo*.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Langkah- langkah dalam penyusunan kerangka Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*)
- Hidayat, Doni. 2006. “Analisis Pengertian Provinsi Riau Dalam Prasarana”. *Tesis*, Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Mailendra, Puji astuti, dkk, 2018. *The Regional Development Based on Leading Sectors In Kuantan Singingi Regency, Riau Province*.

- Marfai, Muh Aris. 2014. *Banjir Pesisir: Kajian Dinamika Pesisir Semarang*.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Muliana rona, puji astuti, akmal fadli. 2018. *Kajian Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar*. Riau : Univesitas Islam Riau
- Nana rukmana, 1993 *program pembangunan prasarana terpadu*
- Soemarwoto, O., 2001. *Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soemarwoto, O., 2003. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetomo. (2010). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat jaringan Drainase* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Jaringan Drasinase: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofwan Muhammad, 2017. *Prioritas Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studikasuk : Desa Semukut-Kabupaten Kampar)*. Riau : Universitas Islam Riau
- Susanto,Edi.2013, *Managemen Pengembangan Prasarana*, Cetakan Pertama Bandung:Lingga Jaya
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Widjaya HAW, 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Rajawali Pers.
2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan/undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 5

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 Tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas pada pasal 33

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 Tahun 1993 Tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan Menteri Perhubungan pada pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan pada pasal 20

Peraturan Bupati Kampar Nomor tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan di paragraf 1 pasal 16

Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerang Jalan Di Kabupaten Kampar

UUD RI No 38 2004 pasal ayat 4 jalan

Undang – undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 1 mengatakan desa

Dalam Undang – Undang (UU) Nomor. 32 Tahun 2015 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

UURI No. 1/2011 (tentang Perumahan dan Permukiman).